



RENCANA KERJA TAHUN 2025

**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BALANGAN**

Jl. Ahmad Yani Km 4,5 Kel. Batu Piring Kec. Paringin Selatan Kode Pos 71662
Telp. (0526) 2029523 Email. disperindagblg@gmail.com



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

Jl. Ahmad Yani Km 4,5 Kel. Batu Piring Kec. Paringin Selatan Kode Pos 71662
Telp. (0526) 2029523 Email. disperindagblg@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BALANGAN**

NOMOR : 050.24/046 /SK/DISPERINDAG-BLG/2024

TENTANG

**RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2025**

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

- Menimbang : a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 367 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

11. Peraturan Bupati Balangan Nomor 55 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BALANGAN TENTANG RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TAHUN 2025
- KESATU : Menetapkan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025;
- KEDUA : Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memuat program, kegiatan dan sub kegiatan, baik yang bersifat internal maupun eksternal beserta pagu indikatif sebagaimana tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Paringin
Pada tanggal : 04 Juli 2024

Plt. Kepala Dinas,


HERLINA, S.Sos, MM
Pembina – (VI/a)
NIP. 19701205 199603 2 003

LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BALANGAN

NOMOR : 050.24/046 /SK/DISPERINDAG-BLG/2024

TENTANG

RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan dapat diselesaikan dan ditetapkan di dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan Nomor: 050.24/046/SK/DISPERINDAG-BLG/2024 pada tanggal 4 Juli 2024.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan merupakan salah satu organisasi pemerintah daerah yang melaksanakan tugas membantu Bupati melaksanakan perencanaan pembangunan industri, usaha industri, sistem informasi industri nasional, sarana distribusi perdagangan, stabilitasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, pengembangan ekspor dan standarisasi dan perlindungan konsumen serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

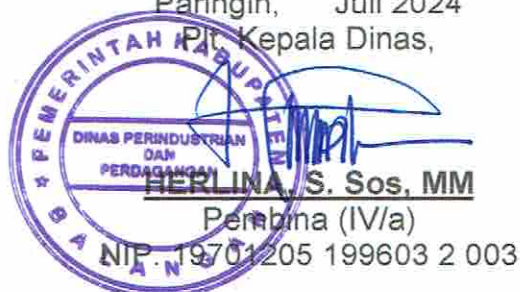
Oleh karena itu, Rencana Kerja (Renja) tahun 2025 ini merupakan panduan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan untuk menghadapi tantangan dalam pelaksanaan tugas.

Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu kami sangat mengharapkan masukan dari berbagai pihak demi kesempurnaan penyusunan renja ini agar dapat dijadikan pedoman dan dasar penilaian pencapaian tujuan dan tugas pokok Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan tahun 2025.

Harapannya, semoga penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini bermanfaat bagi pembangunan bidang Perindustrian dan Perdagangan dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat di Kabupaten Balangan.

Paringin, Juli 2024

Pt. Kepala Dinas,



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan ..	29
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian Dan Perdagangan.....	45
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	50
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	65
BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN.....	66
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	66
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan ..	71
3.3 Program dan Kegiatan	72
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	82
4.1 Faktor-Faktor yang Menjadi Bahan Pertimbangan Dalam Penetapan Program dan Kegiatan.....	82
4.2 Analisa Sosial Ekonomi	82
4.3 Uraian Garis Besar Mengenai Rekapitulasi Program dan Kegiatan ..	87
BAB V PENUTUP	97

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kabupaten Balangan	6
Tabel 2.2 Pengukuran Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan menengah, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2023.....	23
Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan	31
Tabel 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Balangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan	52
Tabel 3.1 Program dan Kegiatan.....	73
Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perindustrian Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026.....	88

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan tahun 2025 ini merupakan dokumen komprehensif berwawasan 1 (satu) tahun. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan serta perwujudan program dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 yang berkedudukan sebagai dokumen perencanaan induk Kabupaten Balangan untuk lima tahun ke depan.

Penyusunan Renja ini memuat program, kegiatan, tujuan, sasaran dan target yang ingin dicapai oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah di tahun 2025 dengan fokus utama adalah:

1. Meningkatkan Kontribusi PDRB Sektor Industri
2. Meningkatkan Kontribusi Perdagangan pada Ekonomi Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus menyusun Rencana Kerja (Renja), dimana Renja SKPD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja ini sangat penting bagi SKPD sebagai dasar untuk penyusunan anggaran dan kegiatan pada tahun 2025 nantinya, yang mana proses penyelenggaraan perencanaan harus dapat memberikan arahan bagi peningkatan pengembangan sosial ekonomi dan kemampuan masyarakat, oleh karena itu diperlukan adanya sinkronisasi antara rencana Program/Kegiatan masyarakat dan pemangku kepentingan.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan renja tahun 2025 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan ini merujuk pada:

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 5 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 5 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026.

9. Peraturan Bupati Balangan Nomor 82 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
10. Peraturan Bupati Balangan Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
11. Peraturan Bupati Balangan Nomor 55 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 107 Tahun 2021 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan tahun anggaran 2025 adalah sebagai dasar dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) tahun anggaran 2025, dimana di dalamnya memuat evaluasi dari target Renstra di tahun 2024 serta rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Renja ini bersama Renja SKPD lingkup Kabupaten Balangan yang lain menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Balangan tahun anggaran 2025.

Secara umum tujuan dari penyusunan renja ini adalah untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses penyusunan kebijakan dan perencanaan program serta terwujudnya penilaian kinerja yang terukur sehingga tercapai efisiensi dan efektivitas dalam hal perencanaan dan penganggaran.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

- 4.1 Faktor-Faktor yang Menjadi Bahan Pertimbangan Dalam Penetapan Program dan Kegiatan
- 4.2 Uraian Garis Besar Mengenai Rekapitulasi Program dan Kegiatan

BAB V. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan pada tahun 2024 secara keseluruhan telah melaksanakan 10 Program, 21 kegiatan dan 40 Sub Kegiatan, dimana dari program tersebut terdapat 9 program prioritas dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan yang termasuk dalam target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan. Penetapan indikator kinerja pada tingkat sasaran dan kegiatan merupakan prasyarat mutlak bagi pengukuran kinerja dari keberhasilan/kegagalan program tersebut.

Secara keseluruhan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan telah menetapkan kelompok indikator kinerja untuk masing-masing program tersebut. Pada tabel 2.1 disajikan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja perangkat daerah dan pencapaian renstra perangkat daerah sampai dengan tahun 2024.

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kabupaten Balangan

KODE	URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTPUTS) KEGIATAN (OUTPUT) KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN (N-3) TAHUN (N-2) TH 2021	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (N-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN N-1) TH 2023	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2) TH 2022	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2) TH 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN BERJALAN TAHUN N-1) TAHUN 2023	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/5)	9	10 = (5 +7+9)	11 = (10/4)
3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH	82.20	74.98	74.4	74.4	100.00	76.40	74.4	97.38
		PERSENTASE TEMUAN BPK YANG DITINDAKLANJUTI	100	100	100	100	100.00	100	100	100.00
		NILAI SKM PERANGKAT DAERAH	95.5	77.84	87.96	87.96	100.00	88.30	88.37	100.08
3.31.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	100	100	100	100	100.00	100	100	100.00
3.31.01.2.01.0001	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	14	1	2	2	100.00	5	7	140.00
3.31.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD	Jumlah Laporan Capaian kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (Laporan)	32	2	5	5	100.00	12	17	141.67
3.31.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Baik (%)	100	100	100	100	100.00	100	100	100.00

KODE	URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTPUT) SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENJARA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN (N-3) TH 2021	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (N-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJARA PERANGKAT DAERAH TAHUN N-1) TH 2023	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENJARA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJARA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2) TH 2022	REALISASI RENJARA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2) TH 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN N-1) TAHUN 2023	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENJARA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5 +7 +9)	11 = (10/4)
3.31.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	3178	238	546	546	100.00	1330	1520	114.29
3.31.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD (Dokumen)	84	12	12		100.00	36	48	133.33
3.31.01.2.05	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Baik (%)	100	100	100	100	100.00	100	100	100.00
3.31.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	50	4	5		100.00	9	9	100.00
3.31.01.2.06	Administrasi Umum perangkat daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Baik (%)	100	100	100	100	100.00	100	100	100.00
3.31.01.2.06.0001	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (Paket)	7	1	1	1	100.00	3	4	133.33
3.31.01.2.06.0002	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Paket)	35	12	4	4	100.00	20	20	100.00
3.31.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	3				0.00	0	0	0.00
3.31.01.2.06.0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (Paket)	14	2	2	2	100.00	6	8	133.33
3.31.01.2.06.0006	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (Dokumen)	21	3	3	3	100.00	7	10	142.86

KODE	URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (REINSTR PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SID DENGAN TAHUN (N-3) TH 2021	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (N-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN N-1) TH 2023	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH SID TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH (N-2) TH 2022	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH (N-2) TH 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN N-1) TAHUN 2023	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5 +7+9)	11 = (10/4)
3.31.01.2.06.0009	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (Laporan)	7	1	1	1	100.00	3	4	133.33
2.17.01.2.07	Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan (%)	100	100	100	100	100.00	100	100	100.00
2.17.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	18				0.00	0	0	0.00
2.17.01.2.07.0006	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan (Unit)	51				0.00	9	9	100.00
3.31.01.2.08	Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang Baik (%)	100	100	100	100	100.00	100	100	100.00
3.31.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan (Laporan)	7	1	1	1	100.00	3	4	133.33
3.31.01.2.08.0004	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (Laporan)	7	1	1	1	100.00	3	4	133.33
3.31.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang Baik (%)	100	100	100	100	100.00	100	100	100.00
3.31.01.2.09.0001	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (Unit)	55	35	35	35	100.00	50	38	76.00

KODE	URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) KEGIATAN (OUTPUT) SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN (N-3) TH 2021	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (N-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN N-1) TH 2023	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2) TH 2022	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2) TH 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN N-1) TAHUN 2023	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5 +7+9)	11 = (10/4)
3.31.01.2.09.0006	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	100	14	97		100.00	170	170	100.00
3.31.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)	4	1				1	1	100
3.31.01.2.09.0011	Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)	6	1			0.00	1	2	200.00
3.30.03	PEMINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	PERSENTASE PASAR DI KABUPATEN BALANGAN YANG MEMENUHI STANDAR KELAYAKAN PASAR (%)	30	0	19.55	19.55	100.00	0.45	20	4444.44
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pasar yang direvitalisasi (%)	100	50	50	50	100.00	75	70	93.33
3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	27	1	6	6	100.00	10	13	130.00
3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	12	9	9	9	100.00	4	9	225.00
3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase Pedagang yang Berjualan pada Tempatnya (%)	100		15	15	100.00	40	63.36	158.40
3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen)	5		1	1	100.00	2	2	100.00

KODE	URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) KEGIATAN (OUTPUT) SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN (N-3) TH 2021	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (N-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN N-1) TH 2023	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH (N-2) TH 2022	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH (N-2) TH 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN N-1) TAHUN 2023	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5 +7+9)	11 = (10/4)
3.30.03.2.02.0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen)	5		1	1	100.00	2	2	100.00
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	PERSENTASE PENINGKATAN PELAKU USAHA EKSPOR (%)	100	0	0	0	0.00	30.00	10	33.33
3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Tujuan Ekspor (%)	100	0	0	0	0.00	0	0	0.00
		Jumlah Calon Pelaku Usaha Ekspor yang Memenuhi Syarat (Orang)	15	0	0	0	0.00	7	0	0.00
3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam pameran dagang (Pelaku Usaha)	15	0	0	0	0.00	10	10	100.00
3.30.05.2.01.0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan (Pelaku Usaha)	15						10	0.00
3.30.05.2.01.0006	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang dilbina (Pelaku Usaha)	3	0			0.00	3.00	1	33.33
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	PERSENTASE PENINGKATAN NILAI PRODUK LOKAL (%)	25				0.00	0	0	0.00
3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Nilai Transaksi Promosi Perdagangan (Rupiah)	2,100,000,000		0	0	0.00	1,279,200,000	706,972,000	55.27
		Persentase Produk Lokal Perdagangan yang Berkualitas (%)	45.45		0	0	0.00	20	58.33	291.65

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) KEGIATAN (OUTPUT) SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SID DENGAN TAHUN (N-3) TH 2021	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (N-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN N-1) TH 2023	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH SID TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2) TH 2022	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2) TH 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN BERJALAN (TAHUN N-1) TAHUN 2023	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5 + 7 + 9)	11 = (10/4)
30.07.2.01.0002	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang melakukan pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi (UMKM)	10					10	12	
30.07.2.01.0003	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan (Dokumen)	1		1	1	100.00		1	0.00
30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota (UMKM)	35				0.00		0	0.00
30.07.2.01.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi (UMKM)	20				0.00		0	0.00
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	PERSENTASE PELAKU USAHA PERDAGANGAN YANG MEMPEROLEH IZIN SESUAI DENGAN KETENTUAN (%)	20	8.42	9.84	9.84	100.00	12	16.8	140.00
		PERSENTASE JUMLAH KEGIATAN PENGENDALIAN FASILITAS PENYIMPANAN BAHAN BERBAHAYA DAN PENGAWASAN DISTRIBUSI, PENGEMASAN DAN PELABELAN BAHAN BERBAHAYA DILAKSANAKAN (%)	100	0	0	0	0.00	0	0	0.00

KODE	URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) KEGIATAN (OUTPUT) SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN (N-3) TH 2021	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (N-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENTJA PERANGKAT DAERAH TAHUN N-1) TH 2023	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENTJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2) TH 2022	REALISASI RENTJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2) TH 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN N-1) TAHUN 2023	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5 + 7 + 9)	11 = (10/4)
3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan yang dikeluarkan (Buah)	90	0	0	0	0.00	10	0	0.00
3.30.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	4	0	0	0	0.00	1	1	100.00
3.30.02.2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Penerbitan Tanda Daftar Gudang (Buah)	7	1					1	0.00
3.30.02.2.02.0001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang (Dokumen)	7	1					1	
3.30.02.2.03	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	Jumlah Pendaftaran Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Dalam Negeri (Buah)	13		6	6	100.00	7	6	85.71
3.30.02.2.03.0001	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	13		6	6	100.00	30.00	6	20.00
3.30.02.2.04	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri	Jumlah Pendaftaran Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri (Buah)	1				0.00		0	0.00

KODE	URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) KEGIATAN (OUTPUT) SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2028	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN (N-3) TH 2021	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (N-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENCANA PERANGKAT DAERAH TAHUN N-1) TH 2023	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENCANA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2) TH 2022	REALISASI RENCANA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2) TH 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN N-1) TAHUN 2023	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5 +7+9)	11 = (10/4)
3.30.02.2.04.0001	Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri	Jumlah Data dan Informasi Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri (Dokumen)	1				0.00		0	0.00
3.30.02.2.05	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Jumlah Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C (Buah)	7				0.00		0	0.00
3.30.02.2.05.0001	Fasilitas Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	7				0.00		0	0.00
3.30.02.2.06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengawasan Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Sesuai Ketentuan (Kali)	9				0.00		0	0.00
3.30.02.2.06.0003	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) (Laporan)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) (Laporan)	9				0.00		0	0.00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTPUT) SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (REINSTR PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN (N-3) TH 2021	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (N-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN N-1) TH 2023	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2) TH 2022	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2) TH 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN N-1) TAHUN 2023	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5 + 7 + 9)	11 = (10/4)
3.30.02.2.07	Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	Jumlah Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) (Buah)	3				0.00		0	0.00
3.30.02.2.07.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal (Dokumen)	3				0.00		0	0.00
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	PERSENTASE STABILITAS DAN JUMLAH KETERSEDIAAN HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK (%)	6.8	7.85	6.1	6.1	100.00	7.800	7.51	98.82
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Kali)	410	44	54	54	100.00	158	190	120.25
		Jumlah Pelaksanaan Pasar Murah (kali)	182	3	38	38	100.00	83	91	109.64
3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12				0.00	0	0	0.00
3.30.04.2.02.0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan (Laporan)	84	12	12	12	100.00	36	48	133.33

KODE	URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTPUT) SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENJANA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN (N-3) TH 2021	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (N-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJANA PERANGKAT DAERAH TAHUN N-1) TH 2023	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJANA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2) TH 2022	REALISASI RENJANA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2) TH 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN N-1) TAHUN 2023	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5 +7+9)	11 = (10/4)
3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	7	1	1	1	100.00	3	4	133.33
3.30.06	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	PERSENTASE JUMLAH KEGIATAN METROLOGI LEGAL DILAKSANAKAN (%)	84.61	61.53	69.23	69.23	100.00	61.53	61.11	99.32
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	PERSENTASE JUMLAH KEGIATAN PENGAWASAN METROLOGI LEGAL DILAKSANAKAN (%)	33.33	0	0	0	0.00	20.83	20.69	99.33
		Jumlah Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda Tera Sah (Buah)	14	1	2	2		5	9	180.00
		Jumlah Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) dan BDKT yang diawasi dan sesuai ketentuan (Buah)	1500	1067	1105	1105	100.00	1200	1034	86.17
3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah alat ukur, alat takar, alat timbang, dan alat perlengkapannya ditera ulang (Unit)	170	0.00	0.00	0.00	0.00	100	98	98.00
3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah pelaku usaha dibidang metrologi legal yang dibina (Orang)	1500	1067	1105	1105	100.00	1200	1034	86.17
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	PERSENTASE IKM YANG MENERAPKAN TEKNOLOGI INDUSTRI (%)	350	50	50	50	100.00	150	201	134.00
			15	6.81	10	10	100.00	12	12.39	103.25

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTPUT) SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENJANG PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN (N-3) TH 2021	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (N-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJANG PERANGKAT DAERAH TAHUN N-1) TH 2023	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENJANG PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET PERANGKAT DAERAH TH 2022	REALISASI RENJANG PERANGKAT DAERAH (N-2) TH 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN N-1) TAHUN 2023	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENJANG PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5 + 7 + 9)	11 = (10/4)
3.31.02.2.01	Penyusunan, penerapan dan evaluasi rencana pembangunan industri Kabupaten/Kota	Jumlah IKM yang Memiliki SDM yang Bersertifikasi Sesuai Kebutuhan (IKM)	5	0	0	0	0.00	0	0	0.00
		Jumlah IKM yang Memiliki Teknologi (IKM)	375	160	238	238	100.00	300	300	100.00
3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dokumen)	3				0.00	0	0	0.00
3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)	7	1	1	1	100.00	3	4	133.33
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	PERSENTASE PERTUMBUHAN IKM (%)	2.18	-9.20	1.36	1.36	100.00	1.68	1.68	100.00
3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah IKM yang Memiliki Izin (IKM)	160	2	2	2	100.00	42	42	100.00

KODE	URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) KEGIATAN (OUTPUT) SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN (N-3) TH 2021	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (N-2)			TARGET PROGRAM KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN N-1) TH 2023	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2) TH 2022	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2) TH 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN N-1) TAHUN 2023	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA TAHUN N-1 (%)
1 3.30.02.2.01.0001	2 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	3 Jumlah dokumen hasil fasilitasi verifikasi teknis pemenuhan kesesuaian persyaratan teknis perizinan berusaha sektor industri dan/atau dalam rangka perluasan usaha untuk bidang usaha dengan resiko usaha menengah-tinggi dan tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan sistem OSS (Dokumen)	4 4	5 1	6 1	7 1	8 = (7/6) 100.00	9 3	10 = (5 +7+9) 4	11 = (10/4) 133.33
3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka pemberian perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	3				0.00		0	0.00

KODE	URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) KEGIATAN (OUTPUT) SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2028	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN (N-3) TH 2021	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (N-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN N-1) TH 2023	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2) TH 2022	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2) TH 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN N-1) TAHUN 2023 10 = (5 +7 +9)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5 +7 +9)	11 = (10/4)
3.31.03.2.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha Industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang Merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)	7				0.00	0	0	0.00
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	PERSENTASE SKALA USAHA IKM YANG BERKEMBANG (%)	3.58	0.13	0.42	0.42	100.00	0.58	0.58	100.00
3.31.04.2.01	Penyediaan informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Nilai Pemasaran Produk IKM (Rupiah)	294.48	231.37	252.757	252.757	100.00	263.187	262.89	99.89
		Jumlah Produk IKM Bersertifikasi (IKM)	166	39	70	70	100.00	135	135	100.00
3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi pengumpulan, pengolahan dan analisis data industri, data kawasan industri serta data lain lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi pengumpulan, pengolahan dan analisis data industri, data kawasan industri serta data lain lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) (Dokumen)	5		1	1	100.00	2	2	100.00
3.31.04.2.01.0002	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas Kabupaten/Kota (Dokumen)	5		1	1	100.00	2	2	100.00



Dalam rangka memenuhi target sasaran RPJMD, arah kebijakan yang dilaksanakan adalah peningkatan kualitas data dan informasi serta memantapkan sinkronisasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah melalui program pengembangan data informasi/statistik daerah dan program perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah. Program pengembangan data informasi/statistik daerah mendukung terhadap tersusunnya perencanaan dan pengendalian pembangunan yang berkualitas. Adanya data/informasi menjadikan perencanaan yang dibuat terukur. Untuk mewujudkan peningkatan kinerja pembangunan daerah dilaksanakanlah program perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah dengan perencanaan yang baik yang senantiasa dipantau dan dikendalikan pelaksanaannya. Diharapkan apa yang telah direncanakan dapat diwujudkan dan target-target yang ditetapkan dapat terpenuhi.

Usaha dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada urusan pemerintahan perdagangan pada sektor sarana dan pengembangan perdagangan yaitu dengan menyelenggarakan program peningkatan sarana distribusi perdagangan guna membantu meningkatkan pembangunan/revitalisasi sarana perdagangan seperti pasar yang ada di Kabupaten Balangan. Pada tahun 2023 jumlah pasar di Kabupaten Balangan berjumlah sebanyak 10 buah. Tahun 2023 dilakukan peningkatan sarana dan prasarana perdagangan dengan realisasi sebesar 0.45% atau sebesar 100.00% dari targetnya sebesar 0.45%. Hal ini terjadi dikarenakan adanya dukungan anggaran sehingga bisa melakukan kegiatan peningkatan sarana dan prasarana perdagangan lainnya. Jumlah pasar/fasilitas pendukung pasar yang direvitalisasi/dibangun sebesar 3 buah dengan capaian 100,00% dari target sebesar 3 buah.

Kemudian urusan pemerintahan perdagangan lainnya yaitu sektor standardisasi, stabilitasi dan pengawasan perdagangan yaitu dengan menyelenggarakan program perizinan dan pendaftaran perusahaan antara lain fasilitasi penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan serta fasilitasi penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri. Hal ini dapat dilihat dari jumlah toko/store yang ada mengalami kenaikan sebesar 250%, pada tahun 2017 berjumlah 2

buah dan diakhir tahun 2022 jumlahnya saat ada 7 buah. Tahun 2023 pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan berhasil direalisasikan sebesar 16.80% dengan capaian sebesar 140.00% dari target sebesar 12.00%. Hal ini didorong oleh faktor:

1. Pengurangan jumlah pelaku usaha yang terdata pada kegiatan Pendataan UMKM tahun 2023 oleh Bidang Koperasi dan Usaha Mikro pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan, dimana pada kegiatan Pendataan UMKM tahun 2022 pelaku usaha klaster pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan seluruh pelaku usaha (petani, pekebun, peternak, dll) dimasukkan kedalam hasil pendataan sedangkan pada kegiatan Pendataan UMKM tahun 2023 hanya pelaku usaha klaster pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan yang bergerak dalam kategori agribisnis/perdagangan (pengepul untuk dijual kembali) yang termasuk dalam pendataan.
2. Banyaknya pedagang kecil yang mendaftarkan izin usahanya, sesuai dengan data yang terdapat pada aplikasi OSS-RBA, yaitu jenis usaha perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman atau tembakau bukan di minimarket/supermarket/hypermarket,

Pada program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yaitu dengan menyelenggarakan pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting ditingkat pasar. Tahun 2023 kemarin tercatat *Rata-rata KVpt* (koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu) adalah 7.51% dengan capaian 98.82% dari target sebesar 7,60%. Hal tersebut disebabkan oleh faktor:

1. Adanya dukungan dari berbagai pihak seperti Tim TPID, Bupati Balangan hingga Forkopimda.
2. Kegiatan pasar murah yang diselenggarakan untuk bisa menekan angka inflasi daerah.
3. Pemantauan harga Barang Pokok dan Barang Penting di beberapa pasar yang ada di Kabupaten Balangan.

Jumlah monitoring informasi harga kebutuhan pokok dan bahan penting berhasil direalisasikan sebesar 60 kali dengan capaian sebesar 100% dari target sebesar 60 kali. Sedangkan jumlah pelaksanaan pasar

mudah direalisasikan sebesar 42 kali dengan capaian 100.00% dari target sebesar 42 kali.

Pada program standardisasi dan perlindungan konsumen dalam meningkatkan produk perdagangan yang aman di Kabupaten Balangan, yaitu dengan melaksanakan kegiatan pengawasan barang beredar dan kegiatan tera/tera ulang dan dinyatakan sah untuk digunakan. Tahun 2023 pada kegiatan pengawasan metrologi legal direalisasikan sebesar 20.69% dengan capaian 99.33% dari target sebesar 20.83% sedangkan pada kegiatan metrologi legal dilaksanakan direalisasikan sebesar 61.11% dengan capaian 99.32% dari target sebesar 61.53%. Jumlah Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) dan BDKT yang diawasi dan sesuai ketentuan sebanyak 98 buah dengan capaian sebesar 98.00% dari target 100 buah. Tahun 2023 terdata sebanyak 67.124 unit alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP), jumlah UTTP yang sudah ditera/tera ulang sebesar 1.034 unit dengan capaian 86.17% dari target sebesar 1.200 unit.

Di sektor industri selama 5 tahun terakhir yaitu periode 2019-2023 rata-rata memberi kontribusi sebesar 1,66%. Padahal sektor Industri juga menjadi salah satu sektor yang diharapkan dapat mengganti peran sektor pertambangan dimasa mendatang. Dalam RPIK sendiri dibuat sasaran pembangunan industri salah satunya adalah peran sektor industri terhadap PDRB. tahun 2023 berada diangka sebesar 1,26% dari target 1,99%. Permasalahan yang dihadapi oleh sektor industri antara lain disebabkan karena belum adanya pengembangan industri hulu dan industri antara berbasis sumber daya alam, kualitas sumber daya manusia industri yang dimiliki terutama dalam penguasaan teknologi belum optimal dan belum tersedianya sarana dan prasarana industri (kawasan industri) yang dapat menarik minat investor dan belum tersedianya rumas kemasan. Berdasarkan data cakupan bina kelompok pengrajin hanya memperlihatkan tren yang stabil tanpa ada peningkatan yang signifikan. Namun realisasi dilapangan membuktikan bahwa para pengrajin tetap bertahan dan mengalami kenaikan omset pemesanan. Peningkatan tersebut karena meningkatnya minat dan ketertarikan masyarakat atas hasil karya dari para pengrajin, selain itu para pengrajin sendiri selalu optimis untuk terus mengaktifkan dan meningkatkan kreatifitas hasil usaha mereka berupa hasil hutan dan kerajinan seperti

bambu, bamban, purun serta hasil hutan lainnya untuk dijadikan kerajinan yang bernilai ekonomis. Begitu pula dengan jumlah usaha industri yang terus meningkat setiap tahunnya, meskipun hanya sebatas usaha kecil dan rumah tangga. Tahun 2023 jumlah IKM sebesar 2.421 IKM dengan pertumbuhan IKM di tahun 2023 yaitu sebesar 1,68% dari tahun 2022 sebesar 2.381 IKM.

Dalam upaya meningkatkan sektor industri kecil menengah yaitu dengan menyelenggarakan program perencanaan dan pembangunan industri, program pengendalian izin usaha industri dan program pengelolaan sistem informasi industri nasional. Tahun 2023 IKM yang menerapkan teknologi industri direalisasikan sebesar 12.39% dengan capaian sebesar 103.25% dari target sebesar 12,00%. Hal tersebut disebabkan oleh faktor:

1. Banyak tersedianya Sumber Daya Alam (SDA)/bahan baku dari alam.
2. Terlaksananya Pelatihan IKM.
3. Adanya bantuan peralatan mesin produksi bagi IKM.

Sedangkan IKM yang Berkembang tahun 2023 sebesar 0.58% dengan capaian sebesar 100.00% dari target sebesar 0.58% Hal tersebut disebabkan oleh faktor:

1. Adanya kegiatan yang mendukung perkembangan industri seperti: sertifikasi produk dan publikasi produk melalui partisipasi dalam pameran atau expo.
2. Antusiasme pelaku usaha untuk memiliki sertifikat produk halal, sehingga produknya bisa masuk ke ritel modern.
3. Adanya edaran tentang penggunaan sasirangan hari jadi Kabupaten Balangan.

Untuk pencapaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun 2023 berdasarkan Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan dapat dilihat pada tabel 2.2 dibawah ini:

**Tabel 2.2 Pengukuran Kinerja Dinas dan Perdagangan
Kabupaten Balangan Tahun 2023**

Sasaran Strategis 1						
Meningkatnya Produktivitas Perdagangan						
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Target Akhir Renstra 2021-2026	Capaian Kinerja Tahun 2023 terhadap Target Akhir Renstra 2021-2026
		(Miliar Rupiah)	(Miliar Rupiah)	(%)	(%)	(%)
1	Peningkatan Volume Perdagangan	791.2	751.05*	94.93	911.65	82.38

Keterangan:

*: Realisasi menggunakan realiasi tahun 2022

BPS, Kabupaten Balangan Dalam Angka 2023

Sasaran Strategis 2						
Meningkatnya Perlindungan Konsumen						
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Target Akhir Renstra 2021-2026	Capaian Kinerja Tahun 2023 terhadap Target Akhir Renstra 2021-2026
		(Nilai)	(Nilai)	(%)	(%)	(%)
1	Index Perlindungan Konsumen di Kabupaten Balangan	0.048	0.0799	166.46	0.0578	138.24

Sasaran Strategis 3						
Meningkatnya Pendapatan IKM						
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Target Akhir Renstra 2021-2026	Capaian Kinerja Tahun 2023 terhadap Target Akhir Renstra 2021-2026
		(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
1	Persentase IKM yang Omzetnya Meningkat	1.18	1.18	100	2.94	40.14
Rata-rata Capaian				115.66		

Sasaran Strategis 1
Meningkatnya Produktivitas Perdagangan

Capaian indikator sasaran “Meningkatnya Produktivitas Perdagangan” adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target (Miliar Rupiah)	Realisasi (Miliar Rupiah)	Capaian (%)
1	Peningkatan Volume Perdagangan	791.20	751.05*	94.93

Keterangan:
*: Realisasi menggunakan realiasi tahun 2022.
BPS, Kabupaten Balangan Dalam Angka 2023

PENINGKATAN VOLUME PERDAGANGAN

Indikator kinerja ini digunakan untuk menghitung peningkatan perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor

Peningkatan
Volume
Perdagangan = Nilai PDRB ADHB menurut Lapangan Usaha (Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor)

Peningkatan
Volume
Perdagangan = 751.05 Miliar Rupiah

Hasil capaian Peningkatan Volume Perdagangan adalah 751.05 Miliar Rupiah. Merupakan hasil dari Nilai PDRB ADHB menurut Lapangan Usaha (Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor) hasil perhitungan BPS tahun 2022.

Perbandingan realisasi Peningkatan Volume Perdagangan tahun 2021 s.d 2023 adalah sebagai berikut:

Peningkatan Volume Perdagangan Tahun 2021 s.d 2023		
Realisasi 2021 (Miliar Rupiah)	Realisasi 2022 (Miliar Rupiah)	Realisasi 2023 (Miliar Rupiah)
671.41	751.05	751.05*

Keterangan:
*: Realisasi menggunakan realiasi tahun 2022
BPS, Kabupaten Balangan Dalam Angka 2023

Sasaran: Meningkatkan Perlindungan Konsumen

Sasaran Strategis 2
Meningkatnya Perlindungan Konsumen

Capaian indikator sasaran “Meningkatnya Perlindungan Konsumen” adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target (Nilai)	Realisasi (Nilai)	Capaian (%)
1	Index Perlindungan Konsumen di Kabupaten Balangan	0.0480	0.0799	166.46

INDEX PERLINDUNGAN KONSUMEN DI KABUPATEN BALANGAN

Indikator kinerja ini digunakan untuk mengukur peningkatan kegiatan perlindungan konsumen, Semakin tinggi pencapaian indikator persentase pelaku usaha yang memperoleh ijin sesuai ketentuan, indikator persentase stabilisasi dan jumlah ketersediaan harga bahan pokok serta indikator persentase UTTP dan perlengkapannya yang bertanda tera sah akan menunjukkan nilai baik bagi Index Perlindungan Konsumen di Kabupaten Balangan.

Index Perlindungan
Konsumen di
Kabupaten
Balangan

$$= (A \text{ Tahun } n - A \text{ Tahun } n - 1) + \text{Nilai mutlak } (B \text{ Tahun } n - B \text{ Tahun } n - 1) + (C \text{ Tahun } n - C \text{ Tahun } n - 1)$$

Keterangan:
A = Persentase Pelaku Usaha Yang Memperoleh Ijin Sesuai Ketentuan
B = Persentase stabilisasi dan jumlah ketersediaan harga bahan pokok
C = Persentase UTTP dan Perlengkapannya yang bertanda tera sah

$$\begin{aligned} &= (16.80\% - 9.84\%) + (7.51\% - 6.10\%) + (29.94\% - 30.32\%) \\ &= 0.0799\% \end{aligned}$$

Hasil capaian Index Perlindungan Konsumen di Kabupaten Balangan adalah 0.0799. Merupakan hasil dari capaian realisasi tahun berjalan dikurang capaian realisasi tahun lalu atas indikator persentase pelaku usaha yang memperoleh ijin sesuai ketentuan, indikator persentase stabilisasi dan jumlah ketersediaan harga bahan pokok serta indikator persentase UTTP dan perlengkapannya yang bertanda tera sah.

Untuk memenuhi target indikator Index Perlindungan Konsumen di Kabupaten Balangan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan telah melakukan kegiatan pada tahun 2023 sebagai berikut:

1. Kegiatan meningkatkan tertib perizinan sektor perdagangan berupa:
 - a. Sosialisasi perizinan berusaha sektor perdagangan
 - b. Fasilitasi perizinan kepada pelaku usaha dengan bekerja sama dengan Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Balangan.
2. Kegiatan meningkatkan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting berupa:
 - a. Melakukan pemantauan dan monitoring harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yang ada dipasar
 - b. Melaksanakan operasi pasar sebanyak 42 (empat puluh dua) kali di 8 (delapan) kecamatan yang ada di Kabupaten Balangan dalam rangka pendendalian inflasi daerah.

3. Kegiatan meningkatkan tertib ukur

Melaksanakan tera tera ulang terdapat 11 (sebelas) tempat usaha utama yaitu 6 (enam) pasar seperti Paringin, Adaro, Batumandi, Halong, Bihara dan Lampihong, 3 (tiga) SPBU, 1 (satu) Pertashop dan 2 (dua) Perusahaan.

4. Kegiatan meningkatkan pengawasan metrologi legal dengan melaksanakan Sosialisasi tentang metrologi legal.

Beberapa upaya akan dilakukan di tahun 2024 untuk mempertahankan/meningkatkan capaian, diantaranya:

1. Penambahan sarana dan prasarana teknis (perangkat komputer/laptop khusus yang terkoneksi internet) untuk memfasilitasi pelaku usaha dalam hal pelayanan pengajuan permohonan perizinan berusaha.
2. Sosialisasi dan/atau bimbingan teknis bagi aparatur pemerintahan desa sehingga pendataan/pemutakhiran data pelaku usaha yang perlu/wajib memiliki NIB dan belum memiliki NIB bisa tepat sasaran.
3. Meningkatkan kinerja tim pemantauan harga atau tim pengendali inflasi daerah dalam menyikapi gejolak harga yang terjadi secara nasional agar tidak memperburuk inflasi daerah.
4. Pendataan pelaku usaha perdagangan serta mengaktifkan laporan resi gudang untuk mendata jumlah penyimpanan bahan pokok

sebagai alternatif karena belum adanya distributor besar/Gudang penyimpanan bahan pokok di Kabupaten Balangan.

- 5. Mengatur jadwal pemantauan harga barang dan jadwal kegiatan pasar murah agar efektif dan tidak saling berbenturan.
- 6. Melayani menyelesaikan uji pojok dan tera ulang bagi yang belum dapat terlayani ditahun 2023.
- 7. Perbaiki dan perluasan layanan tera atau tera ulang serta melaksanakan layanan terhadap pasar-pasar yang belum dijangkau di tahun 2023.

Perbandingan realisasi Index Perlindungan Konsumen di Kabupaten Balangan tahun 2021 s.d 2023 adalah sebagai berikut:

Index Perlindungan Konsumen di Kabupaten Balangan
Tahun 2021 s.d 2023

Realisasi 2021 (Nilai)	Realisasi 2022 (Nilai)	Realisasi 2023 (Nilai)
0.1440	0.0567	0.0799

Sasaran Strategis 3
Meningkatnya Pendapatan IKM

Capaian indikator sasaran "Meningkatnya Pendapatan IKM" adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Persentase IKM yang Omzetnya Meningkat	1.18	1.18	100.00

PERSENTASE IKM YANG OMZETNYA MENINGKAT

Indikator kinerja ini digunakan untuk mengidentifikasi jumlah IKM yang omzetnya meningkat.

Persentase IKM yang Omzetnya Meningkat = $\frac{\text{Jumlah IKM yang omzetnya meningkat di tahun } N}{\text{jumlah IKM di tahun } N} \times 100$

Persentase IKM yang Omzetnya Meningkat = $\frac{29}{2.421} \times 100 = 1.18 \%$

Hasil capaian Persentase IKM yang Omzetnya Meningkat adalah 1.18%. Merupakan hasil dari indentifikasi data IKM sandang dan IKM pangan tahun 2023 yang omzetnya mengalami peningkatan dengan cara

membandingkan hasil penjualan ditahun N terhadap hasil penjualan ditahun N-1.

Untuk memenuhi target indikator Persentase IKM yang Omzetnya Meningkat, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan telah melakukan kegiatan pada tahun 2023 sebagai berikut:

1. Fasilitasi sertifikasi halal produk bagi IKM.
2. Pelatihan peningkatan kompetensi bagi IKM.
3. Pemberian bantuan mesin dan peralatan bagi IKM.
4. Fasilitasi pendaftaran merek produk bagi IkM.
5. Partisipasi dalam pameran atau expo untuk mempromosikan produk-produk bagi IKM.

Beberapa upaya akan dilakukan di tahun 2024 untuk mempertahankan/meningkatkan capaian, diantaranya:

1. Pengembangan kemampuan pelaku usaha industri sesuai kompetensi yang diperlukan.
2. Pendampingan terhadap pelaku usaha industri yang belum mahir menggunakan teknologi produksi.
3. Fasilitas berupa bantuan mesin dan peralatan bagi IKM.
4. Menjadikan sentra industri sebagai wadah pertemuan dengan para pelaku usaha industri.
5. Menjalin kerja sama dengan instansi/pihak swasta terkait pengembangan produk IKM sesuai potensi pasar.

Perbandingan realisasi Persentase IKM yang Omzetnya Meningkat tahun 2021 s.d 2023 adalah adalah sebagai berikut:

Persentase IKM yang Omzetnya Meningkat
Tahun 2021 s.d 2023

Realisasi 2021 (%)	Realisasi 2022 (%)	Realisasi 2023 (%)
		1.18

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Secara keseluruhan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan pada tahun 2023, telah menyelenggarakan kegiatan-

kegiatan dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat melalui urusan pemerintahan perindustrian dan urusan pemerintahan perdagangan ada yang telah melebihi target yang ditetapkan, akan tetapi meskipun target yang ditetapkan dalam renstra telah tercapai, kegiatan tersebut tetap dilaksanakan untuk terus menjaga agar pertumbuhan ekonomi yang ada di Kabupaten Balangan selalu mengalami kenaikan. Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dirasakan berdampak langsung bagi IKM melalui pemberian bantuan alat usaha, fasilitasi IKM mengikuti pelatihan teknis produksi, fasilitasi pembuatan sertifikat halal produk, yang efeknya diharapkan terjadi peningkatan penjualan yang semakin baik. Meningkatnya produk perdagangan yang aman, meningkatnya kualitas alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang telah ditera serta meningkatnya tatakelola pasar dirasakan langsung juga oleh konsumen. Untuk lebih jelas terkait rincian kegiatan yang telah dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.3 dibawah ini:

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Balangan

Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi				Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2025	Tahun 2026	
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan			5.50	3.84	6.40	6.50	5.97	5.50	3.84	4.16	6.60	6.70	
Kontribusi PDRB Sektor Industri			1.90	1.29	1.99	2.00	1.98	1.90	1.29	1,26	2.01	2.02	
Peningkatan Volume Perdagangan (Miliar Rupiah)			671.41	751.05	791.2	831,350	640.39	671.41	751.05	867.76	871.50	911.65	
Index Perlindungan Konsumen di Kabupaten Balangan			0.1440	0.0567	0.0480	0,0549		0.1440	0.0567	0.0799	0.0567	0.0578	
Persentase IKM yang Omzetnya Meningkat					1.18	1,68				1.18	2.31	2.94	
Persentase Pasar di Kabupaten Balangan yang Memenuhi Standar Kelayakan Pasar (%)						10.00				0.45	10.00	10.00	
Persentase Peningkatan Pelaku Usaha Ekspor (%)					30.00	50.00				10.00	70.00	100.00	
Persentase Peningkatan Nilai Produk Lokal (%)						7.88					21.74	25.00	
Persentase Pelaku Usaha Perdagangan yang Memperoleh Izin Sesuai Dengan Ketentuan (%)			8.42	9.84	12.00	17.85	4.80	8.42	9.84	16.80	18.42	20.00	

Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi				Proyeksi			Catatan Analisis
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2025	Tahun 2026				
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
Persentase Jumlah Kegiatan Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Dilaksanakan (%)																
Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok (%)			7.85	6.10	7.60	7.40	8.08	7.85	6.10	7.51	7.00	6.80				
Persentase Jumlah Kegiatan Metrologi Legal Dilaksanakan (%)			61.53	69.23	61.53	69.23	46.15	61.53	69.23	61.11	76.92	84.61				
Persentase Jumlah Kegiatan Pengawasan Metrologi Legal Dilaksanakan (%)					20.83	25.00				20.69	29.16	33.33				
Persentase IKM yang Menerapkan Teknologi Industri (%)			6.81	10	12	13.00	4.10	6.81	10	12.39	14.00	15.00				
Persentase Pertumbuhan IKM (%)			5.81	1.36	1.68	1.98	5.81	-9.20	1.36	1.68	2.11	2.18				
Persentase Skala Usaha IKM yang Berkembang (%)			0.13	0.42	0.58	1.58		0.13	0.42	0.58	2.58	3.58				

Untuk bidang saran dan pengembangan perdagangan tahun 2023 melakukan pembangunan/rehab/perbaikan pasar melalui program peningkatan sarana distribusi perdagangan, antara lain:

1. Perbaikan talang air, instalasi listrik dan lampu, pengurukan halaman pasar dipasar uren.
2. Pemasangan kanopi dipasar paringin.
3. Pemasangan kanopi dan pengecatan dipasar modern paringin.
4. Revitalisasi pasar modern paringin berupa penggantian rolling dor pemasangan kanopi.
5. Penambahan ruang pelayanan di pasar modern paringin.
6. Pengecatan, perbaikan fasilitas umum wc, talang air di pasar batumandi.
7. Pengecoran lantai los belakang dipasar bihara.

Seialin itu juga telah melaksanakan pengelolaan sarana distribusi perdagangan melalui :

1. Fasilitas pengelolaan sarana distribusi perdagangan berupa:
 - a. Kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup, TNI dan stackholder lainnya dalam kegiatan aksi kebersihan pada kegiatan penilaian pasar bersih berbasis komunitas tingkat nasional, kemudian dalam rangka penilaian adipura di pasar modern paringin.
 - b. Kerjasama dengan TNI dalam kegiatan pembersihan pasar Batumandi dalam hari jadi TNI.
 - c. Kegiatan pembersihan pasar Halong
 - d. Pembersihan drainase pasar Paringin.
2. Pembinaan dan pengendalian pengelola sarana distribusi perdagangan berupa kegiatan pembentukan tim koordinasi penataan pedagang di kabupaten balangan serta penataan pedagang yang sudah dilakukan di pasar uren, pasar modern paringin dan pasar paringin.
3. Pemberdayaan pengelola sarana distribusi perdagangan berupa sosialisasi/himbauan/memberikan informasi dan pengetahuan mengenai pengelolaan dan manajemen pasar, mengembangkan potensi dan kualitas pasar dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan pasar

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan kenyamanan kepada pengunjung pasar, mengingat pasar merupakan sentra perdagangan yang ada di Kabupaten Balangan.

Dalam hal pembinaan pelaku usaha perdagangan melalui:

1. Program pengembangan ekspor, antara lain:
 - a. Fasilitasi pelaku usaha UMKM dalam pameran dagang dalam event balangan expo sebanyak 15 (lima belas) UMKM sebagai berikut:

Daftar Pelaku Usaha UMKM yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang

No	Nama	Nama Pelaku Usaha	Alamat
1.	Karlina	UMKM Tiga Binian	Desa Mantimin Kecamatan Batumandi
2.	Abdul Hadi	UMKM Damii Mandai Gundul	Desa Riwa Kecamatan Batumandi
3.	Nor Hikmah	UMKM AdhaMirza	Desa Riwa Kecamatan Batumandi
4.	Muhammad Sadik	UMKM Cemis	Desa Nungka Kecamatan Awayan
5.	Siti Nurjannatun Na'im	UMKM Keripik Pisang Bunda	Desa Lasung Batu Kecamatan Paringin
6.	Dewi Purwati Nurtalia	UMKM Tampulu	Kel. Paringin Timur
7.	Anita Permata	UMKM Madu Meratus	Kel. Batu Piring
8.	Rohana	Pengrajin Sasirangan	Kel. Paringin Kota
9.	Nurul Hikmah	Pengrajin Sasirangan	Kel. Paringin Kota
10.	Sri Agustina	Pengrajin Sasirangan	Desa Batu Mandi
11.	Santi Sutina	Pengrajin Sasirangan	Desa Baruh Panyambaran
12.	Meka Sandi	Pengrajin Anyaman Tirik	Desa Liyu
13.	Laila Hayati	Pengrajin Sasirangan Warna Alam	Desa Teluk Karya
14.	Risna Amalia	Pengrajin Anyaman Purun	Desa Teluk Karya

No	Nama	Nama Pelaku Usaha	Alamat
15.	Hety Karmila	Pengrajin Anyaman Tirik	Desa Mamigang

- b. Pembinaan pelaku usaha ekspor sebanyak 3 (tiga) UMKM sebagai berikut:

Daftar Pelaku Usaha Ekspor yang dibina

No	Pelaku Usaha	Alamat
1	Maskur	Desa Bihara Hilir Kecamatan Awayan
2	Risna Amalia	Desa teluk Karya Kecamatan Lampihong
3	Hety Karmila	Desa Mamigang Kecamatan Halong

2. Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri berupa fasilitasi UMKM dalam melakukan pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhorelan dan jasa akomodasi kepada 19 (sembilan belas) UMKM sebagai berikut:

Daftar UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan

No	Pelaku Usaha	Alamat
1	Suyati	RT. 03 UPT Pupuyuan Kec. Lampihong
2	Sutini	RT. 06 UPT Matang Hanau Kec. Lampihong
3	Iswati Marfu'ah	UPT Matang Hanau Kel.Matang Hanau Kec.Lampihong
4	Abdul Hadi	Desa Riwa Kec. Batumandi
5	Nur Hikmah	Desa Riwa No.34 Kec. Batumandi
6	Karlina	Rt. 01 Desa Mantimin Kec. Batumandi
7	Nor Ilmiya	Desa Karuh Rt.03 Kec. Batumandi
8	Ernawati	Desa Karuh Kec. Batumandi
9	Muhammad Ridno	Gula Semut Jahe Merah
10	Rahimah	Rt. 03 Desa Karuh Kec. Batumandi
11	Hj. Rinawati	Desa Bihara Hilir Kec. Awayan
12	Muhammad Sadik	Rt. 01 Desa Nungka Kec. Awayan
13	Maskur	Rt. 01 Desa Bihara Hilir Kec. Awayan

No	Pelaku Usaha	Alamat
14	Saripah Suharda	Haur Batu Kec. Paringin
15	Siti Nurjannatun Na'im	Desa Lasung Batu Kec. Paringin
16	Nurul Fadhilah	Paringin Kota
17	Titin Wartini	Paringin Timur
18	Petis Acil Hadar	Paringin Kota
19	Lilis Iri Darmayanti	Desa Mungkur Uyam RT 004

Untuk bidang standardisasi, stabilitasi dan pengawasan perdagangan tahun 2023 telah melaksanakan pertama, kegiatan pendataan harga bahan pokok dan barang penting sebanyak 16 kali di 2 (dua) pasar, yaitu Pasar Modern Adaro dan Pasar Batumandi guna mengukur tingkat stabilisasi harga barang kebutuhan pokok. Dalam rangka penanganan inflasi di daerah telah dilaksanakan kegiatan menggelar pasar murah sebanyak 13 kali, yang terbagi menjadi 2 (dua) kegiatan pasar sebagai berikut:

1. Pasar Murah Reguler

No	Tanggal	Desa	Kecamatan
1	23 Januari 2024	Galumbang	Paringin Selatan
2	29 Januari 2024	Simpang Tiga	Lampihong
3	30 Januari 2024	Halubau	Paringin Selatan
4	07 Februari 2024	Mamigang	Halong
5	20 Februari 2024	Hamarung	Juai
6	22 Februari 2024	Ju'uh	Tebing Tinggi
7	23 Februari 2024	Halaman Kecamatan Paringin	Paringin
8	07 Maret 2024	Baruh Penyambaran	Halong
9	20 Maret 2024	Halaman Kecamatan Paringin Selatan	Paringin Selatan
10	22 Maret 2024	Paringin Timur	Paringin
11	25 Maret 2024	Karuh	Batumandi
12	25 Maret 2024	Tundi	Awayan

2. Pasar Murah Khusus (HKBN)

No	Tanggal	Desa	Kecamatan
1	20 Maret 2024	Halaman Kecamatan Paringin Selatan	Paringin Selatan

Kedua, kegiatan tera ulang telah dilaksanakan pada 1 (satu) SPBU yaitu PT. Putri Fajar Sukses Mandiri sebanyak 5 UTTP, tera ulang juga

telah dilaksanakan pada pasar sirap kecamatan juai sebanyak 44 UTTP sedangkan layanan tera kantor hingga saat ini baru melayani permintaan sebanyak 3 UTTP.

Untuk bidang perindustrian tahun 2023 telah melakukan pendataan terhadap industri kecil dan menengah pada beberapa kecamatan. Sampai dengan akhir tahun 2023 jumlah Industri Kecil Menengah (IKM) sebanyak 2.421 IKM. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan melalui bidang perindustrian juga melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Fasilitasi sertifikasi halal kepada 6 (enam) IKM pangan yang ada di Kabupaten Balangan sebagai berikut:

Daftar IKM Fasilitasi Sertifikasi Halal 2023

No	Nama Penanggung Jawab	Nama IKM	Produk	Alamat
1	Nur Hasanah	Mba Sanah	Keripik Tempe	Desa Sumber Rezeki Rt 10 Kec. Juai Kab. Balangan
2	Indarwati	Mama Ilul	Kembang Gula Kelapa	Desa Sumber Rezeki Rt 02 Kec. Juai Kab. Balangan
3	Muyasaroh	Kukeripik	Keripik Keladi	Desa Sumber Rezeki Rt 05 Kec. Juai Kab. Balangan
4	Ngatmi	Keripik Wong Ndeso	Keripik Sukun	Desa Sumber Rezeki Rt 02 Kec. Juai Kab. Balangan
5	Siti Samsyiah	Wingko Bude	Wingko Babat	Desa Sumber Rezeki Rt 10 Kec. Juai Kab. Balangan
6	Suwarti	Mama Ahyati	Keripik Pegagan	Desa Sumber Rezeki Rt 15 Kec. Juai Kab. Balangan

Dengan adanya label halal diharapkan produk tersebut dapat dengan mudah masuk ke pasaran, baik pasar lokal maupun luar. Selain itu konsumen mendapat kepastian dan jaminan bahwa produk-produk tersebut tidak mengandung sesuatu yang tidak halal dan juga diproduksi dengan cara yang halal. Sertifikat halal memberikan keuntungan bagi semua konsumen, tidak hanya untuk konsumen muslim saja tetapi juga konsumen non-muslim yang ingin menjaga kesehatannya dengan menjaga makanannya, karena halal tidak saja berarti kandungannya yang halal, namun juga diproses dengan cara yang beretika, sehat dan baik. Sertifikat halal juga membuka peluang ekspor yang luas kepada

suatu produk, serta memiliki keunggulan kompetitif jika dibandingkan dengan perusahaan pangan lainnya.

2. Fasilitasi Pendaftaran Merek/HKI kepada 10 (sepuluh) IKM yang ada di Kabupaten Balangan sebagai berikut:

Daftar IKM Fasilitasi Pendaftaran Merek/HKI Tahun 2023

No	Nama Penanggung Jawab	Nama IKM	Merek	Alamat
1.	Anita Permata	Anita Permata	Anita Permata	Harapan Baru RT 11 Kel. Batu Piring Kec. Paringin Selatan Kab. Balangan
2	Alfianor	Alfina	Alfina	Komp. Perumahan Balangan Residence No 209 Rt 05 Desa Bungin Kec. Paringin Selatan Kab. Balangan
3	Hindun	Acil Hadar	Acil Hadar	Jl. Ahmad Kurnia RT 02 Kel. Paringin Timur Kec. Paringin Kab. Balangan
4	Siti Nurjannatun Na'im	Bunda	Bunda nay	Lasung Batu RT 01 Kec. Paringin Kab. Balangan
5	Armaniah	CBA	Browngin	Jl. Perintis Kampung Baru No 35 RT 17 Kel. Paringin Kota Kec. Paringin Kab. Balangan
6	Iswati Marfuah	Sirasa	Sirasa	Pupuyuan RT 01 Kec. Lampihong Kab. Balangan
7	Lilis Iri Darmayanti	Lilis	Lilis	Jl. Setia Karsa RT 04 Desa Mungkur Uyam Kec. Juai Kab. Balangan
8	Ernawati	Chang Wang	Baper Cuy	Karuh RT 01 Kec. Batu Mandi Kab. Balangan
9	Yulita	Ababil Beauty	Ababil Beauty	Baramban RT 01 Kec. Awayan Kab. Balangan
10	Risna Amalia	Karya Anyam	Karya Anyaman	Teluk Karya RT 01 Kec. Lampihong Kab. Balangan

3. Kegiatan Pelatihan kepada para IKM sebagai berikut:

Daftar Pelatihan Ikm Tahun 2023

No	Pelatihan	Jumlah Peserta
1	Pelatihan Pembuatan Produk Kemasan	10 Orang
2	Pelatihan Pembuatan Kue	20 Orang
3	Pelatihan Ecoprint	10 Orang
4	Pelatihan Pembuatan Pangan Berbasis Bahan Lokal	13 Orang
5	Pelatihan Teknik Finishing Anyaman	10 Orang
6	Pelatihan Kriya Bambu dan Kayu	40 Orang

4. Pemberikan bantuan berupa Alat/Mesin Produksi untuk meningkatkan Produksi dengan penggunaan teknologi tinggi kepada para IKM sebagai berikut:

No	Nama Industri	Alamat	Nama Penerima	Rincian	Jumlah
1	Sentra Industri Es Kristal Mercy	Desa Gunung Pandau Kel. Paringin Timur Kec. Paringin	Syamsudin (Ketua)	Perlengkapan Mesin Pembuat Es Kristal	1
		Gunung Pandau RT 10 Kel. Paringin Timur Kec. Paringin	Supriyitno		
		Gunung Pandau RT 10 Kel. Paringin Timur Kec. Paringin	Norbaita Putri		
		Gunung Pandau RT 10 Kel. Paringin Timur Kec. Paringin	Jamilah		
		Gunung Pandau RT 10 Kel. Paringin Timur Kec. Paringin	Muhammad Hamkani		
2	Sentra Penjahit Sejahtera Bersama	Baru No 17, Kec. Awayan	Hayatun Niah (Ketua)	Mesin Jahit, Mesin Obras dan Kelengkapannya	8
		Balanti, Kec. Awayan	Nahdah	Mesin Jahit, Mesin Obras dan Kelengkapannya	
		Balanti, Kec. Awayan	Mariana	Mesin Jahit, Mesin Obras dan	

No	Nama Industri	Alamat	Nama Penerima	Rincian	Jumlah
				Kelengkapan nya	
		Balanti No 57, Kec. Awayan	Sapnah	Mesin Jahit, Mesin Obras dan Kelengkapan nya	
		Balanti, Kec. Awayan	Mahrita	Mesin Jahit, Mesin Obras dan Kelengkapan nya	
		Balanti, Kec. Awayan	Masliah	Mesin Jahit, Mesin Obras dan Kelengkapan nya	
		Balanti No 55, Kec. Awayan	Rahmawati	Mesin Jahit, Mesin Obras dan Kelengkapan nya	
		Balanti No 52, Kec. Awayan	Eka Novita	Mesin Jahit, Mesin Obras dan Kelengkapan nya	
3	Sentra Penjahit Mawar Merah	Bakung Kec. Batumandi	Rumita Aulia (Ketua)	Mesin Jahit, Mesin Obras dan Kelengkapan nya	7
		Bakung No 18 Kec. Batumandi	Khairina	Mesin Jahit, Mesin Obras dan Kelengkapan nya	
		Bakung Kec. Batumandi	Warni	Mesin Jahit, Mesin Obras dan Kelengkapan nya	
		Bakung Kec. Batumandi	Saniah	Mesin Jahit, Mesin Obras dan Kelengkapan nya	
		Bakung Kec. Batumandi	Patimah	Mesin Jahit, Mesin Obras dan Kelengkapan nya	
		Bakung Kec. Batumandi	Aniati	Mesin Jahit, Mesin Obras dan Kelengkapan nya	

No	Nama Industri	Alamat	Nama Penerima	Rincian	Jumlah
		Bakung Kec. Batumandi	Lasiah	Mesin Jahit, Mesin Obras dan Kelengkapannya	
4	Sentra Penjahit Kenanga	Teluk Karya, Kecamatan Lampihong	Alfianor (Ketua)	Mesin Jahit dan Kelengkapannya	9
		Kandang Jaya RT 04, Kec. Lampihong	Aliansyah	Mesin Jahit dan Kelengkapannya	
		Sungai Tabuk RT 01, Kec. Lampihong	Ahmad Safillah	Mesin Jahit dan Kelengkapannya	
		Lajar RT 01, Kec. Lampihong	Misriah	Mesin Jahit dan Kelengkapannya	
		Simpang Tiga, Kec. Lampihong	Rini Paulina	Mesin Jahit dan Kelengkapannya	
		Lajar, Kec. Lampihong	Mardiah	Mesin Jahit dan Kelengkapannya	
		Lajar No 97, Kec. Lampihong	Raudah	Mesin Jahit dan Kelengkapannya	
		Lajar, Kec. Lampihong	Jumbra	Mesin Jahit dan Kelengkapannya	
		Lajar No 94, Kec. Lampihong	Herma Yanti	Mesin Jahit dan Kelengkapannya	
5	Sentra Penjahit Maju Ba Imbai	Kecamatan Juai	Rudi (Ketua)	Mesin Jahit, Mesin Obras dan Kelengkapannya	15
		Hamarung No 13 RT 01 Kec. Juai	Syahdi	Mesin Jahit, Mesin Obras dan Kelengkapannya	
		Hamarung Kec. Juai	Ahyar	Mesin Jahit, Mesin Obras dan Kelengkapannya	

No	Nama Industri	Alamat	Nama Penerima	Rincian	Jumlah
		Hamarung No 42 Kec. Juai	Budi Otomo	Mesin Jahit, Mesin Obras dan Kelengkapannya	
		Buntu Karau No 345 C Kec. Juai	Sapriansyah	Mesin Jahit, Mesin Obras dan Kelengkapannya	
		Buntu Karau No 231 Kec. Juai	M. Edi Apruni	Mesin Jahit, Mesin Obras dan Kelengkapannya	
		Hukai, Kec. Juai	Yurdani	Mesin Jahit, Mesin Obras dan Kelengkapannya	
		Hukai, Kec. Juai	Siti Juleiha	Mesin Jahit, Mesin Obras dan Kelengkapannya	
		Hukai, Kec. Juai	Saudah	Mesin Jahit, Mesin Obras dan Kelengkapannya	
		Hamarung, Kec. Juai	Hendra	Mesin Jahit, Mesin Obras dan Kelengkapannya	
		Sirap RT 01 Kec. Juai	Nova Novianti	Mesin Jahit, Mesin Obras dan Kelengkapannya	
		Hukai, RT 03 Kec. Juai	Reza Ramadhani	Mesin Jahit, Mesin Obras dan Kelengkapannya	
		Sirap RT 01 Kec. Juai	Rahma Safitri	Mesin Jahit, Mesin Obras dan Kelengkapannya	
		Muara Ninian Kec. Juai	Mesrani	Mesin Jahit, Mesin Obras dan Kelengkapannya	
		Hukai No. 175 Kec. Juai	M. Husni Rifa'i	Mesin Jahit, Mesin Obras	

No	Nama Industri	Alamat	Nama Penerima	Rincian	Jumlah
				dan Kelengkapannya	
6	Sentra Penggilingan Usaha Muda Kreatif	Mapat, Kec. Halong	Yasni	Mesin Pamarut Kelapa dan Mesin Tepung	11
		Buntu Pilanduk, Kec. Halong	Abdul Hadi	Mesin Pamarut Kelapa dan Mesin Tepung	
		Marajai, Kec. Halong	Dian Saputra	Mesin Pamarut Kelapa dan Mesin Tepung	
		Mamigang, Kec. Halong	Yulianto	Mesin Pamarut Kelapa dan Mesin Tepung	
		Tinggar, Kec. Halong	Buyang	Mesin Pamarut Kelapa dan Mesin Tepung	
		Binuang Santang, Kec. Halong	Jainudin	Mesin Pamarut Kelapa dan Mesin Tepung	
		Mamigang, Kec. Halong	Rani	Mesin Pamarut Kelapa dan Mesin Tepung	
		Mamigang No 18, Kec. Halong	Ibak	Mesin Pamarut Kelapa dan Mesin Tepung	
		Tabuan, Kec. Halong	Acim	Mesin Pamarut Kelapa dan Mesin Tepung	
		Marajai, Kec. Halong	Reja	Mesin Pamarut Kelapa dan Mesin Tepung	
		Libaru Sungkai, Kec. Halong	Katik	Mesin Pamarut Kelapa dan	

No	Nama Industri	Alamat	Nama Penerima	Rincian	Jumlah
				Mesin Tepung	
7	Sentra Anyaman Bambu Tirik	Desa Mamirang, Kec. Halong	Hety Karmila	Mesin Jahit, Mesin Sestet dan Mesin Cangklong	1

Secara umum saat ini baik Industri Kecil dan Menengah (IKM) hingga tahun keempat perencanaan rencana kerja (Renja) SKPD dihadapkan pada rendahnya daya saing dan rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) industri, akibatnya pengembangan produk, khususnya produk pangan masih rendah dan juga desain kemasan produk masih belum berorientasi pada pasar. Keterbatasan modal masih menjadi kendala utama bagi IKM yang ada di Kabupaten Balangan. Pada umumnya modal bersumber dari modal (tabungan) sendiri atau sumber-sumber informal, namun sumber-sumber permodalan ini sering tidak cukup untuk kegiatan usaha produksi.

Pelaku usaha sendiri ditahun mendatang akan dihadapkan pada kondisi pertumbuhan ekonomi dunia yang sangat cepat. Oleh karena itu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan terus berupaya melakukan pembinaan dan pelatihan, fasilitasi kemitraan dengan pihak ketiga kepada IKM. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi saat ini sangat diperlukan bagi pelaku usaha sebagai sarana memperluas jaringan pemasaran, misalnya untuk mengenalkan produk-produk yang dihasilkan. Melalui fasilitasi promosi dan pameran, pelaku usaha dan IKM secara tidak langsung diajak untuk melihat produk-produk dari luar, tujuan utamanya adalah mengharapkan pelaku usaha bisa mendapatkan pengetahuan dan keterampilan guna sebagai pengembangan produk yang dihasilkan saat ini, Keberpihakan pemerintah daerah dimulai dari dikeluarkannya surat edaran Bupati Balangan nomor: 518.3/104/DKUKMPP-BLG/2021 tentang Prioritas Pembelian/Penggunaan Produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)/Pedagang (Pasar) Lokal di Kabupaten Balangan. Dengan tujuan agar belanja pemerintah daerah lebih mengutamakan menggunakan produk lokal yang ada di Kabupaten Balangan, usaha ini diperkuat oleh pemerintah pusat melalui Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) yang merupakan upaya pemerintah untuk

mendorong masyarakat agar lebih menggunakan produk dalam negeri dibandingkan produk impor, sehingga produk yang dihasilkan/diproduksi oleh IKM mampu masuk pasar dalam negeri.

Selain itu juga pemerintah daerah dalam hal ini Bapperida Kabupaten Balangan meluncurkan program "Belanja Cil" yang bertujuan sebagai berikut:

1. Menambah peredaran dan perputaran uang di Kabupaten Balangan.
2. Menghidupkan pasar-pasar tradisional yang ada di Kabupaten Balangan.
3. Transaksi keuangan para pedagang dan pelaku usaha kecil menengah.
4. Meningkatkan daya beli dan daya jual Masyarakat.

Sebagai leading sektor penggampu urusan pemerintahan bidang perdagangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan diminta untuk mengawal keberlanjutan program tersebut.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

Dalam upaya terhadap pencapaian visi dan misi SKPD serta capaian terhadap target dari program prioritas RPJMD ada beberapa hambatan serta permasalahan yang kami hadapi pada tahun 2023 sehingga berpengaruh pada pencapaian target kinerja SKPD kami, yang secara tidak langsung juga berpengaruh terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah dalam upaya untuk mewujudkan perekonomian masyarakat balangan berbasis pertanian dan perkebunan, pariwisata dan ekonomi kreatif.

Secara garis besar ada beberapa permasalahan yang kami hadapi selama tahun 2023 antara lain:

1. Data pelaku usaha industri masih belum seluruhnya terintegrasi dengan website basis data milik kementerian perindustrian, dikarenakan kurangnya pengetahuan pelaku usaha mengenai website basis data tersebut, keengganan pelaku usaha dalam memasukan data mereka dikarenakan terbatasnya waktu maupun kemampuan dalam mengakses website tersebut, kurangnya pemahaman pelaku usaha mengenai isi dari NIB (Nomor Induk Berusaha) tersebut sehingga setelah memiliki izin usaha elektronik

- yang berupa NIB pelaku usaha merasa izin tersebut sudah cukup untuk dipakai untuk menjalankan kegiatan usaha.
2. Produk lokal yang bersaing hingga tingkat provinsi masih terbatas, dikarenakan belum memenuhi standar yang diharapkan oleh ritel modern baik dari kemasan, izin edar maupun sertifikasi produk. Keikutsertaan di event pameran atau expo sebagai media promosi sudah rutin dilakukan, namun belum memberikan dampak secara signifikan sehingga perlu adanya terobosan baru dalam mengenalkan potensi produk lokal.
 3. Rendahnya sarana dan prasarana perdagangan yang ada dalam pemenuhan SNI 8152: 2015.
 4. Infrastruktur pasar dalam menunjang kebersihan yang ada belum memadai.
 5. Potensi ekspor yang ada di Kabupaten Balangan pada sektor hasil pertanian, perkebunan, perikanan, industri serta perdagangan belum terlihat.
 6. Belum optimal jaringan pemasaran baik ditingkat lokal maupun nasional.
 7. Belum optimalnya pembangunan kemitraan antara pelaku usaha/UMKM dengan pelaku jasa ritel modern
 8. Kenaikan harga barang yang cukup tinggi menjelang hari besar keagamaan (HBKN) disebabkan menurunnya jumlah pasokan dipasaran.
 9. Pasar murah Reguler yang digelar belum bisa merambah hingga ke semua desa yang ada di Kabupaten Balangan.
 10. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya tera/tera ulang. Masyarakat masih merasa bahwa tera/tera ulang bukan suatu kewajiban dikarenakan aturan hukum mengenai kewajiban tera/tera ulang belum secara menyeluruh diketahui oleh seluruh masyarakat dan belum ada penegasan dalam pelaksanaan aturan hukum tersebut.
 11. Masih kurangnya jumlah peralatan standar kemetrolagian, khususnya Anak Timbangan bidur untuk pelayanan tera/tera ulang Timbangan Jembatan milik Perusahaan.
 12. Unit Metrologi Legal (UML) Kabupaten Balangan tidak memiliki tenaga reparatir bersertifikasi. Dalam pelaksanaan tera/tera ulang,

reparatir sangat diperlukan dalam penjustiran dan reparasi Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP). Untuk menciptakan tenaga reparatir, perlu mengikuti Pelatihan Reparasi yang diselenggarakan di luar Provinsi. Persyaratan peserta pelatihan reparasi yaitu THL/ Honorer Unit Metrologi Legal Kabupaten/Kota yang belum berpengalaman maupun yang sudah berpengalaman.

Adapun hal-hal yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan sosialisasi kepada pelaku usaha industri mengenai kewajibannya dalam menjalankan kegiatan usaha, sehingga memudahkan dalam pengambilan data, perlu adanya koordinasi dengan instansi yang menangani perizinan usaha agar setiap ada pelaku usaha yang membuat izin usaha diarahkan untuk memenuhi kewajiban yang terdapat pada NIB.
2. Perlunya adanya pengembangan usaha melalui sertifikasi dan promosi produk. Dengan melakukan pembinaan dan peningkatan kompetensi bagi pelaku usaha industri kecil agar produk yang dihasilkan dapat berkelanjutan serta mampu bersaing dipasar global. Serta perlu pemetaan potensi suplai produk jadi maupun setengah jadi kepada Perusahaan yang ada di Kalimantan Selatan.
3. Perlunya peningkatan sarana dan prasarana perdagangan berupa revitalisasi bangunan utama pasar dan pengadaan beberapa fasilitas pendukung pasar lainnya serta pemberdayaan pengelola dan pedagang pasar dalam pemenuhan SNI 8152: 2015.
4. Pemeliharaan infrastruktur pasar dalam menunjang kebersihan pasar
5. Pengembangan ekspor tidak hanya bersifat promosi dagang saja tetapi menyentuh hingga perbaikan kualitas produk dan kualitas pelaku usahanya.
6. Peningkatan jaringan pemasaran melalui promosi pameran dagang ditingkat lokal maupun nasional.
7. Peningkatan kemiteran tidak hanya dengan ritel modern tetapi bisa merambah kemiteraan dengan marketplace, perhorelan dan jasa akomodasi.
8. Melakukan monitoring terhadap kenaikan harga barang menjelang hari besar keagamaan (HBKN), menjalin koordinasi dan kerjasama

- dengan pihak distributor untuk memastikan tidak terjadinya kelangkaan logistik serta menggelar operasi pasar khusus.
9. Menggelar kegiatan operasi pasar murah/reguler hingga merambah ke semua desa yang ada di Kabupaten Balangan.
 10. Perlu dilaksanakan sidak Alat, Ukur, Takar, Timbang (UTTP) yang bekerjasama dengan stakeholder terkait khususnya aparat hukum. Selain itu frekuensi pelaksanaan sidak perlu ditambah agar masyarakat lebih melek akan adanya kewajiban tera/tera ulang.
 11. Perlunya belanja modal untuk menambah jumlah peralatan standar kemetrolagian khususnya anak timbangan bidur agar pelaksanaan tera/tera ulang Timbangan Jembatan dapat dilaksanakan secara mandiri. Hingga saat ini, AT bidur yang dimiliki sebanyak 0.5 ton dan ditambah dengan pengadaan pada tahun 2024 yaitu 3 ton. Sehingga bidur yang akan dimiliki sebanyak 3.5 ton. Masih diperlukan sebanyak 6.5 ton untuk pelaksanaan tera/tera ulang timbangan jembatan milik perusahaan secara mandiri.
 12. Perlunya Tenaga Honorer UML Kabupaten Balangan mengikuti Pelatihan Teknis Tenaga Reparatur yang diselenggarakan di luar Provinsi oleh Balai Pelatihan SDM Metrologi, Mutu dan Jasa Perdagangan (BPMJP).

Dari uraian tersebut menjadi dasar dalam merumuskan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2025, menyelenggarakan pelatihan industri berbasis spesialisasi dan kompetensi, fasilitasi sertifikasi halal dan merek, fasilitasi perizinan dan pendaftaran perusahaan, revitalisasi sarana prasarana perdagangan, pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting ditingkat pasar, pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting ditingkat pasar dan perlindungan konsumen menjadi fokus kami untuk dilaksanakan ditahun mendatang.

Beberapa masalah dan tantangan pokok yang akan dihadapi ditahun mendatang adalah sebagai berikut:

1. Terbatasnya kemampuan pelaku usaha dalam mengakses informasi sehingga perlu pendampingan dan sebaran pelaku usaha industri tidak hanya berpusat pada pusat kota sehingga perlu alokasi waktu dan tenaga dalam pendampingan.

2. Terbatasnya kemampuan pelaku usaha memanfaatkan peluang pasar, penguasaan teknologi dan kemampuan SDM dalam melakukan sertifikasi produk secara mandiri sehingga perlu pendampingan dan pembinaan.
3. Belum optimanya bangunan utama pasar dan pengadaan beberapa fasilitas pendukung pasar lainnya.
4. Tidak imbangnya jumlah fasilitas infrastruktur pasar yang menunjang kebersihan pasar dengan peningkatan limbah pasar yang dihasilkan.
5. Masih rendahnya tujuan ekspor serta masih rendahnya pelaku usaha ekspor baik dari segi keterampilan dan kualitas produk ekspor yang belum memenuhi syarat ekspor.
6. Belum optimalnya pelaku usaha dalam manajemen sistem rantai pasok dalam jaringan pemasaran dan kemitraan
7. Terus melakukan monitoring terhadap kenaikan harga barang menjelang hari besar keagamaan (HBKN), menjalin koordinasi dan kerjasama dengan pihak distributor untuk memastikan tidak terjadinya kelangkaan logistik serta menggelar operasi pasar khusus.
8. Terus menggelar kegiatan operasi pasar murah/reguler yang merambah ke semua desa di Kabupaten Balangan demi meningkatkan pemerataan ekonomi dan dirasakan oleh semua masyarakat bukan hanya didaerah perkotaan.
9. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya tera/tera ulang.
10. Masih kurangnya Peralatan Standar Kemetrolagian khususnya anak timbangan bidur untuk pelayanan tera/tera ulang timbangan jembatan milik Perusahaan di Kabupaten Balangan.
11. Tidak memiliki tenaga reparatir yang bersertifikasi sehingga dalam pelaksanaan tera/tera ulang khususnya Sidang Tera Ulang, dalam hal reparasi dikerjakan secara otodidak oleh tenaga honorer.

Setelah kita ketahui berbagai macam permasalahan yang dihadapi, maka dapat ditentukan isu-isu penting dalam penyelenggaraan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai berikut:

1. Meningkatkan daya saing pelaku usaha industri untuk menghadapi persaingan ekonomi global.

2. Melakukan integrasi data dan informasi pelaku usaha industri melalui website kementerian perindustrian.
13. Sinkronisasi program peningkatan sarana distribusi perdagangan dalam hal penyediaan sarana distribusi perdagangan, fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan, pembinaan dan pengendalian pengelola sarana distribusi perdagangan dan pemberdayaan pengelola sarana distribusi perdagangan dalam pemenuhan SNI 8152: 2015.
3. Meningkatkan fasilitas pasar yang menunjang kebersihan pasar.
4. Meningkatkan tujuan ekspor dan peningkatan jumlah pelaku usaha ekspor melalui kegiatan penjangkaran.
5. Meningkatkan SDM pelaku usaha dalam manajemen sistem rantai pasok dalam jaringan pemasaran dan kemitraan
6. Meningkatkan jumlah pelaksanaan kegiatan pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting.
7. Meningkatkan jumlah pelaksanaan operasi pasar murah baik sifatnya khusus ataupun reguler.
8. Melaksanakan sidak Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) bekerjasama dengan stakeholder terkait khususnya aparat hukum agar Masyarakat melek betapa pentingnya tera/tera ulang untuk perlindungan konsumen dan melek hukum terkait tera/tera ulang guna menciptakan Masyarakat Melek Metrologi.
9. Penambahan ruang lingkup pelayanan Unit Metrologi Legal (UML) Kabupaten Balangan dengan penambahan peralatan standar kemetrolagian khususnya Anak Timbangan Bidur melalui belanja modal AT Bidur sebanyak 325 buah bidur 20 kg.
10. Perlunya Tenaga Honorer Unit Metrologi Legal (UML) Kabupaten Balangan mengikuti Pelatihan Tenaga Reparatur yang diselenggarakan di luar Provinsi oleh Balai Pelatihan SDM Metrologi, Mutu dan Jasa Perdagangan (BPMJP).

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Secara keseluruhan target kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada tahun 2021-2026 dapat tercapai dengan baik, meskipun ada beberapa sasaran

dari kegiatan yang tidak sepenuhnya dapat tercapai. Dalam dokumen ini memuat informasi tentang rumusan kebutuhan program hasil review terhadap rancangan awal RKPD beserta indikator kinerja, besaran target dan besaran dana yang dibutuhkan untuk masing-masing program yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan.

Tabel 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Balangan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan					Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian				
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH	80.40	%	9,510,249,040	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH	80.40	%	11,746,166,746	
			PERSENTASE TEMUAN BPK YANG DITINDAKLANJUTI	100	%			PERSENTASE TEMUAN BPK YANG DITINDAKLANJUTI	100	%			
			NILAI SKM PERANGKAT DAERAH	90.00	%				NILAI SKM PERANGKAT DAERAH	90.00	%		
I	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	100	%	58,450,000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	100	%	58,451,500	
1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	Dokumen	16,880,000	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	Dokumen	16,881,500	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD	Kab. Balangan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD (Laporan)	5	Laporan	24,880,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD	Kab. Balangan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD (Laporan)	5	Laporan	24,880,000	
3	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	2	Dokumen	16,690,000	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	2	Dokumen	16,690,000	
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Layanan	100	%	6,647,156,340	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Layanan	100	%	8,038,987,696	

No	Rancangan Awal RKPD		Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	
1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18
1	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Catatan Penting
2	2	3	4	5	6
3	3	4	5	6	7
4	4	5	6	7	8
5	5	6	7	8	9
6	6	7	8	9	10
7	7	8	9	10	11
8	8	9	10	11	12
9	9	10	11	12	13
10	10	11	12	13	14
11	11	12	13	14	15
12	12	13	14	15	16
13	13	14	15	16	17
14	14	15	16	17	18
15	15	16	17	18	19
16	16	17	18	19	20
17	17	18	19	20	21
18	18	19	20	21	22
19	19	20	21	22	23
20	20	21	22	23	24
21	21	22	23	24	25
22	22	23	24	25	26
23	23	24	25	26	27
24	24	25	26	27	28
25	25	26	27	28	29
26	26	27	28	29	30
27	27	28	29	30	31
28	28	29	30	31	32
29	29	30	31	32	33
30	30	31	32	33	34
31	31	32	33	34	35
32	32	33	34	35	36
33	33	34	35	36	37
34	34	35	36	37	38
35	35	36	37	38	39
36	36	37	38	39	40
37	37	38	39	40	41
38	38	39	40	41	42
39	39	40	41	42	43
40	40	41	42	43	44
41	41	42	43	44	45
42	42	43	44	45	46
43	43	44	45	46	47
44	44	45	46	47	48
45	45	46	47	48	49
46	46	47	48	49	50
47	47	48	49	50	51
48	48	49	50	51	52
49	49	50	51	52	53
50	50	51	52	53	54
51	51	52	53	54	55
52	52	53	54	55	56
53	53	54	55	56	57
54	54	55	56	57	58
55	55	56	57	58	59
56	56	57	58	59	60
57	57	58	59	60	61
58	58	59	60	61	62
59	59	60	61	62	63
60	60	61	62	63	64
61	61	62	63	64	65
62	62	63	64	65	66
63	63	64	65	66	67
64	64	65	66	67	68
65	65	66	67	68	69
66	66	67	68	69	70
67	67	68	69	70	71
68	68	69	70	71	72
69	69	70	71	72	73
70	70	71	72	73	74
71	71	72	73	74	75
72	72	73	74	75	76
73	73	74	75	76	77
74	74	75	76	77	78
75	75	76	77	78	79
76	76	77	78	79	80
77	77	78	79	80	81
78	78	79	80	81	82
79	79	80	81	82	83
80	80	81	82	83	84
81	81	82	83	84	85
82	82	83	84	85	86
83	83	84	85	86	87
84	84	85	86	87	88
85	85	86	87	88	89
86	86	87	88	89	90
87	87	88	89	90	91
88	88	89	90	91	92
89	89	90	91	92	93
90	90	91	92	93	94
91	91	92	93	94	95
92	92	93	94	95	96
93	93	94	95	96	97
94	94	95	96	97	98
95	95	96	97	98	99
96	96	97	98	99	100
97	97	98	99	100	101
98	98	99	100	101	102
99	99	100	101	102	103
100	100	101	102	103	104
101	101	102	103	104	105
102	102	103	104	105	106
103	103	104	105	106	107
104	104	105	106	107	108
105	105	106	107	108	109
106	106	107	108	109	110
107	107	108	109	110	111
108	108	109	110	111	112
109	109	110	111	112	113
110	110	111	112	113	114
111	111	112	113	114	115
112	112	113	114	115	116
113	113	114	115	116	117
114	114	115	116	117	118
115	115	116	117	118	119
116	116	117	118	119	120
117	117	118	119	120	121
118	118	119	120	121	122
119	119	120	121	122	123
120	120	121	122	123	124
121	121	122	123	124	125
122	122	123	124	125	126
123	123	124	125	126	127
124	124	125	126	127	128
125	125	126	127	128	129
126	126	127	128	129	130
127	127	128	129	130	131
128	128	129	130	131	132
129	129	130	131	132	133
130	130	131	132	133	134
131	131	132	133	134	135
132	132	133	134	135	136
133	133	134	135	136	137
134	134	135	136	137	138
135	135	136	137	138	139
136	136	137	138	139	140
137	137	138	139	140	141
138	138	139	140	141	142
139	139	140	141	142	143
140	140	141	142	143	144
141	141	142	143	144	145
142	142	143	144	145	146
143	143	144	145	146	147
144	144	145	146	147	148
145	145	146	147	148	149
146	146	147	148	149	150
147	147	148	149	150	151
148	148	149	150	151	152
149	149	150	151	152	153
150	150	151	152	153	154
151	151	152	153	154	155
152	152	153	154	155	156
153	153	154	155	156	157
154	154	155	156	157	158
155	155	156	157	158	159
156	156	157	158	159	160
157	157	158	159	160	161
158	158	159	160	161	162
159	159	160	161	162	163
160	160	161	162	163	164
161	161	162	163	164	165
162	162	163	164	165	166
163	163	164	165	166	167
164	164	165	166	167	168
165	165	166	167	168	169
166	166	167	168	169	170
167	167	168	169	170	171
168	168	169	170	171	172
169	169	170	171	172	173
170	170	171	172	173	174
171	171	172	173	174	175
172	172	173	174	175	176
173	173	174	175	176	177
174	174	175	176	177	178
175	175	176	177	178	179
176	176	177	178	179	180
177	177	178	179	180	181
178	178	179	180	181	182
179	179	180	181	182	183
180	180	181	182	183	184
181	181	182	183	184	185
182	182	183	184	185	186
183	183	184	185	186	187
184	184	185	186	187	188
185	185	186	187	188	189
186	186	187	188	189	190
187	187	188	189	190	191
188	188	189	190	191	192
189	189	190	191	192	193
190	190	191	192	193	194
191	191	192	193	194	195
192	192	193	194	195	196
193	193	194	195	196	197
194	194	195	196	197	198
195	195	196	197	198	199
196	196	197	198	199	200
197	197	198	199	200	201
198	198	199	200	201	202
199	199	200	201	202	203
200	200	201	202	203	204
201	201	202	203	204	205
202	202	203	204	205	206
203	203	204	205	206	207
204	204	205	206	207	208
205	205	206	207	208	209
206	206	207	208	209	210
207	207	208	209	210	211
208	208	209	210	211	212
209	209	210	211	212	213
210	210	211	212	213	214
211	211	212	213	214	215
212	212	213	214	215	216
213	213	214	215	216	217
214	214	215	216	217	218
215	215	216	217	218	219
216	216	217	218	219	220
217	217	218	219	220	221
218	218	219	220	221	222
219	219	220	221	222	223
220	220	221	222	223	224
221	221	222	223	224	225
222	222	223	224	225	226
223	223	224	225	226	227
224	224	225	226	227	228
225	225	226	227	228	229
226	226	227	228	229	230
227	227	228	229	230	231
228	228	229	230	231	232
229	229	230	231	232	233
230	230	231	232	233	234
231	231	232	233	234	235
232	232	233	234	235	236
233	233	234	235	236	237
234	234	235	236	237	238
235	235	236	237	238	239</

Rancangan Awal RKPD													
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
				5	6				Indikator Kinerja	Target Capaian	12	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1									10	11		13	14
10	Penyediaan barang cetakan dan pengandaan	Kab. Balangan	Jumlah paket barang cetakan dan pengandaan yang disediakan (Paket)	2	Paket	60.000.000	Penyediaan barang cetakan dan pengandaan	Kab. Balangan	Jumlah paket barang cetakan dan pengandaan yang disediakan (Paket)	2	Paket	59.999.700	
11	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (Dokumen)	3	Dokumen	8.407.200	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (Dokumen)	3	Dokumen	8.301.600	
12	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. Balangan	Jumlah laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (Laporan)	1	Laporan	562.858.100	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. Balangan	Jumlah laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (Laporan)	1	Laporan	668.076.500	
VI	Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan (%)	100	%	787.239.600	Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Balangan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan (%)	100	%	6.27.962.700	
13	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Balangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	2	Unit	570.000.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Balangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1	Unit	413.291.000	
14	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Kab. Balangan	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan (Unit)	14	Unit	217.239.600	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Kab. Balangan	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan (Unit)	14	Unit	214.671.700	
VI	Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang Baik (%)	100	%	344.199.150	Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang Baik (%)	100	%	395.554.650	
15	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Balangan	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan (Laporan)	1	Laporan	157.199.150	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Balangan	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan (Laporan)	1	Laporan	157.199.150	
16	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kab. Balangan	Jumlah laporan Penyediaan jasa pelayanan umum	1	Laporan	187.000.000	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kab. Balangan	Jumlah laporan Penyediaan jasa pelayanan umum	1	Laporan	238.355.500	

Rancangan Awal RKPD													
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
VII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintahan daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang Baik (%)	100	%	782,612,650	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintahan daerah		kantor yang disediakan (Laporan)	100	%	1,023,716,200	
17	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kab. Balangan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (Unit)	55	Unit	306,512,650	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kab. Balangan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (Unit)	55	Unit	306,489,200	
18	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Kab. Balangan	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	97	Unit	34,300,000	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Kab. Balangan	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	97	Unit	34,110,000	
19	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Kab. Balangan	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)	1	Unit	441,800,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Kab. Balangan	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)	1	Unit	683,117,000	
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN				18.42	%	135,000,000	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		PERSENTASE PELAKU USAHA PERDAGANGAN YANG MEMPEROLEH IZIN SESUAI DENGAN KETENTUAN (%)	18.42	%	237,162,500	
				100	%				PERSENTASE JUMLAH KEGIATAN PENGENDALIAN FASILITAS PENYIMPANAN BAHAN BERBAHAYA DAN PENGAWASAN DISTRIBUSI, PENGEMASAN DAN PELABELAN BAHAN BERBAHAYA	100	%		

Rancangan Awal RKPD													
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Hasil Analisis Kebutuhan			Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan Penting
				5	6				Indikator Kinerja	Target Capaian			
1	2	3	4 DILAKSANAKAN (%)			7	8	9	10 DILAKSANAKAN (%)	11	12	13	14
VIII	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan		Jumlah Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan yang dikeluarkan (Buah)	70	Buah	30.000.000	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan		Jumlah Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan yang dikeluarkan (Buah)	70	Buah	50.000.000	
20	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Balangan	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	1	Dokumen	30.000.000	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Balangan	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	1	Dokumen	50.000.000	
IX	Penerbitan Tanda Daftar Gudang		Jumlah Penerbitan Tanda Daftar Gudang (Buah)	5	Buah	25.000.000	Penerbitan Tanda Daftar Gudang		Jumlah Penerbitan Tanda Daftar Gudang (Buah)	5	Buah	50.000.000	
21	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang (Dokumen)	5	Dokumen	25.000.000	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang (Dokumen)	5	Dokumen	50.000.000	
X	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri		Jumlah Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Dalam Negeri (Buah)	11	Buah	30.000.000	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri		Jumlah Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Dalam Negeri (Buah)	11	Buah	45.265.000	
22	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara	11	Dokumen	30.000.000	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara	11	Dokumen	45.265.000	

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan

Rancangan Awal RKPD														
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan Penting	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			Elektronik (Dokumen)											
XI	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Pengawasan Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Sesuai Ketentuan (Kali)	3	Kali	25,000,000	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Pengawasan Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Sesuai Ketentuan (Kali)	3	Kali	60,000,000		
23	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Kab. Balangan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) (Laporan)	3	Laporan	25,000,000	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Kab. Balangan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) (Laporan)	3	Laporan	60,000,000		
XII	Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)		Jumlah Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) (Buah)	1	Buah	25,000,000	Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)		Jumlah Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) (Buah)	1	Buah	31,397,500		
24	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal (Dokumen)	1	Dokumen	25,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal (Dokumen)	1	Dokumen	31,397,500		
	PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		PERSENTASE PASAR DI KABUPATEN BALANGAN YANG MEMENUHI STANDAR KELAYAKAN PASAR (%)	10.00	%	1,975,576,600	PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		PERSENTASE PASAR DI KABUPATEN BALANGAN YANG MEMENUHI STANDAR KELAYAKAN PASAR (%)	10.00	%	2,109,490,100		

Rancangan Awal RKKPD													
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Hasil Analisis Kebutuhan			Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan Penting
				5	6				10	11	12		
1	2	3	4	91,67	%		8	9	Persentase Pasar yang direvitalisasi (%)	91,67	%	1,992,790,100	14
XIII	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Balangan	Persentase Pasar yang direvitalisasi (%)	4	Unit	1,869,376,600	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Balangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	4	Unit	592,849,900	
25	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Balangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	11	Unit	1,286,576,600	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Balangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	11	Unit	1,399,940,200	
26	Facilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Balangan	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	80,00	%	106,200,000	Facilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Balangan	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	80,00	%	116,700,000	
XIV	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Kab. Balangan	Persentase Pedagang yang Berjualan pada Tempatnya (%)	1	Dokumen	65,600,000	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Balangan	Persentase Pedagang yang Berjualan pada Tempatnya (%)	1	Dokumen	76,100,000	
27	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen)	1	Dokumen	40,600,000	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen)	1	Dokumen	40,600,000	
28	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen Hasil Pemberdayaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen)	7,00	%	571,534,400	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen Hasil Pemberdayaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen)	7,00	%	571,534,400	
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING													
XV	Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Kali)	73	Kali	571,534,400	Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Kali)	73	Kali	571,534,400	
			Jumlah Pelaksanaan Pasar Murah (Kali)	32	Kali				Jumlah Pelaksanaan Pasar Murah (Kali)	32	Kali		

Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan						
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	Pemanfaatan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	Kab. Balangan	Jumlah Laporan Pemanfaatan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Rakyat yang Terintegrasi Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan (Laporan)	12	Laporan	114,800,000	Pemanfaatan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	Kab. Balangan	Jumlah Laporan Pemanfaatan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Rakyat yang Terintegrasi Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan (Laporan)	12	Laporan	139,234,400	
30	Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Jumlah laporan Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	1	Laporan	300,000,000	Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Jumlah laporan Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	1	Laporan	432,300,000	
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		PERSENTASE PENINGKATAN PELAKU USAHA EKSPOR (%)	70	%	265,600,000	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		PERSENTASE PENINGKATAN PELAKU USAHA EKSPOR (%)	70	%	329,559,600	
XVI	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Peningkatan Tujuan Ekspor (%)	66.67	%	265,600,000	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Peningkatan Tujuan Ekspor (%)	66.67	%	329,559,600	
			Jumlah Calon Pelaku Usaha Ekspor yang Memenuhi Syarat (Orang)	10	Orang				Jumlah Calon Pelaku Usaha Ekspor yang Memenuhi Syarat (Orang)	10	Orang		
31	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Kab. Balangan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan (Pelaku Usaha)	5	Pelaku Usaha	265,600,000	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Kab. Balangan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan (Pelaku Usaha)	5	Pelaku Usaha	329,559,600	
	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		PERSENTASE JUMLAH KEGIATAN METROLOGI	76.92	%	386,882,560	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		PERSENTASE JUMLAH KEGIATAN METROLOGI	76.92	%	444,262,400	

Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan						
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			LEGAL DILAKSANAKAN (%)	29,16	%				LEGAL DILAKSANAKAN (%)	29,16	%		
			PERSENTASE JUMLAH KEGIATAN PENGAWASAN METROLOGI LEGAL DILAKSANAKAN (%)						PERSENTASE JUMLAH KEGIATAN PENGAWASAN METROLOGI LEGAL DILAKSANAKAN (%)				
XVII	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan		Jumlah SDM Kemetrologian yang memperoleh sertifikasi teknis (Orang)	2	Orang	388.882,560	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan		Jumlah SDM Kemetrologian yang memperoleh sertifikasi teknis (Orang)	2	Orang	444.262,400	
			Jumlah Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UITP) bertanda Tera Sah (Buah)	1.400	Buah				Jumlah Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UITP) bertanda Tera Sah (Buah)	1.400	Buah		
			Jumlah Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UITP) dan BDKT yang diawasi dan sesuai ketentuan (Buah)	160	Buah				Jumlah Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UITP) dan BDKT yang diawasi dan sesuai ketentuan (Buah)	160	Buah		
32	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Kab. Balangan	Jumlah alat ukur, alat takar, alat timbang, dan alat perlengkapan di tera ulang (Unit)	1.400	Unit	283.882,560	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Kab. Balangan	Jumlah alat ukur, alat takar, alat timbang, dan alat perlengkapan di tera ulang (Unit)	1.400	Unit	297.312,400	
33	Pengawasan/Pernyuluhan Metrologi Legal	Kab. Balangan	Jumlah pelaku usaha dibidang metrologi legal yang dibina (Orang)	50	Orang	103.000,000	Pengawasan/Pernyuluhan Metrologi Legal	Kab. Balangan	Jumlah pelaku usaha dibidang metrologi legal yang dibina (Orang)	50	Orang	146.350,000	
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		PERSENTASE PENINGKATAN NILAI PRODUK LOKAL (%)	21,74		1.166.700,000	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		PERSENTASE PENINGKATAN NILAI PRODUK LOKAL (%)	21,74		1.708.013,700	
XVIII	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		Nilai Transaksi Promosi Perdagangan (Rupiah)	1.680.000,000	Rupiah	1.166.700,000	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		Nilai Transaksi Promosi Perdagangan (Rupiah)	1.680.000,000	Rupiah	1.708.013,700	

Rancangan Awal RKPD													
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Persentase Produk Lokal Perdagangan yang Berkualitas (%)	37.50	%				Persentase Produk Lokal Perdagangan yang Berkualitas (%)	37.50	%		
34	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota (UMKM)	28	UMKM	1,166,700,000	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota (UMKM)	28	UMKM	1,708,013,700	
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		PERSENTASE IKM YANG MENERAPKAN TEKNOLOGI INDUSTRI (%)	14.00	%	300,000,000	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		PERSENTASE IKM YANG MENERAPKAN TEKNOLOGI INDUSTRI (%)	14.00	%	836,724,000	
XIX	Penyusunan, penerapan dan evaluasi rencana pembangunan industri Kabupaten/Kota		Jumlah IKM yang Memiliki SDM yang Bersertifikasi Sesuai Kebutuhan (IKM)	5	IKM	300,000,000	Penyusunan, penerapan dan evaluasi rencana pembangunan industri Kabupaten/Kota		Jumlah IKM yang Memiliki SDM yang Bersertifikasi Sesuai Kebutuhan (IKM)	5	IKM	836,724,000	
			Jumlah IKM yang Memiliki Teknologi (IKM)	350	IKM				Jumlah IKM yang Memiliki Teknologi (IKM)	350	IKM		
35	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dokumen)	1	Dokumen	100,000,000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dokumen)	1	Dokumen	295,995,000	
36	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)	1	Dokumen	200,000,000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)	1	Dokumen	540,729,000	
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI		PERSENTASE PERTUMBUHAN IKM (%)	2.11	%	120,000,000	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI		PERSENTASE PERTUMBUHAN IKM (%)	2.11	%	244,722,500	

Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan						
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
XX	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Pertuisan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (UKI), dan Izin Pertuisan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIInas)		Jumlah IKM yang Memiliki Izin (IKM)	120	IKM	120.000,000	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Pertuisan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (UKI), dan Izin Pertuisan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIInas)		Jumlah IKM yang Memiliki Izin (IKM)	120	IKM	244,722,500	
37	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/kota	Kab. Balangan	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIInas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1	Dokumen	45.000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/kota	Kab. Balangan	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIInas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1	Dokumen	159,461,500	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka pemberian penjaminan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Kab. Balangan	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)	1	Dokumen	75.000.000	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka pemberian penjaminan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Kab. Balangan	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)	1	Dokumen	85.261.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		PERSENTASE SKALA USAHA IKM YANG BERKEMBANG (%)	2.58	%	325,191,800	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		PERSENTASE SKALA USAHA IKM YANG BERKEMBANG (%)	2.58	%	1,169,984,600	
XXI	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota		Nilai Pemasaran Produk IKM (Rupiah)	284.05	Rupiah	325,191,800	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota		Nilai Pemasaran Produk IKM (Rupiah)	284.05	Rupiah	1,169,984,600	
			Jumlah Produk IKM Bersertifikasi (IKM)	156	IKM				Jumlah Produk IKM Bersertifikasi (IKM)	156	IKM		
39	Fasilitasi pengumpulan, pengolahan dan analisis data industri, data kawasan industri serta data lain lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi pengumpulan, pengolahan dan analisis data industri, data kawasan industri serta data lain lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri	1	Dokumen	151,400,000	Fasilitasi pengumpulan, pengolahan dan analisis data industri, data kawasan industri serta data lain lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi pengumpulan, pengolahan dan analisis data industri, data kawasan industri serta data lain lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri	1	Dokumen	169,985.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan renja ini dapat bersumber dari usulan SKPD, dari masukan pihak legislatif (DPRD) maupun aspirasi dari masyarakat dimana usulan-usulan Program dan Kegiatan tersebut dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan dari tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan yang terkait dengan usulan yang bersumber dari sektor atau bidang Sosial Ekonomi biasanya meliputi usulan mengenai pemberdayaan masyarakat, perkuatan modal, pembinaan pelaku usaha dan bantuan peralatan usaha bagi pelaku usaha.

Semua usulan masyarakat dalam musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) dan usulan dari pokok pikiran (Pokir) pihak legislatif/DPRD akan diverifikasi dan apabila sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan dan atau apabila memungkinkan akan dilaksanakan dengan mempertimbangkan skala prioritas dan ketersediaan dana yang ada akan diakomodir pada program dan kegiatan pada tahun anggaran 2025.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan sasaran dan prioritas bidang pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Dalam rancangan akhir RPJPN 2025-2045, pentahapan Implementasi RPJPN 2025-2045 dilaksanakan dalam empat tahap rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) sebagai berikut:

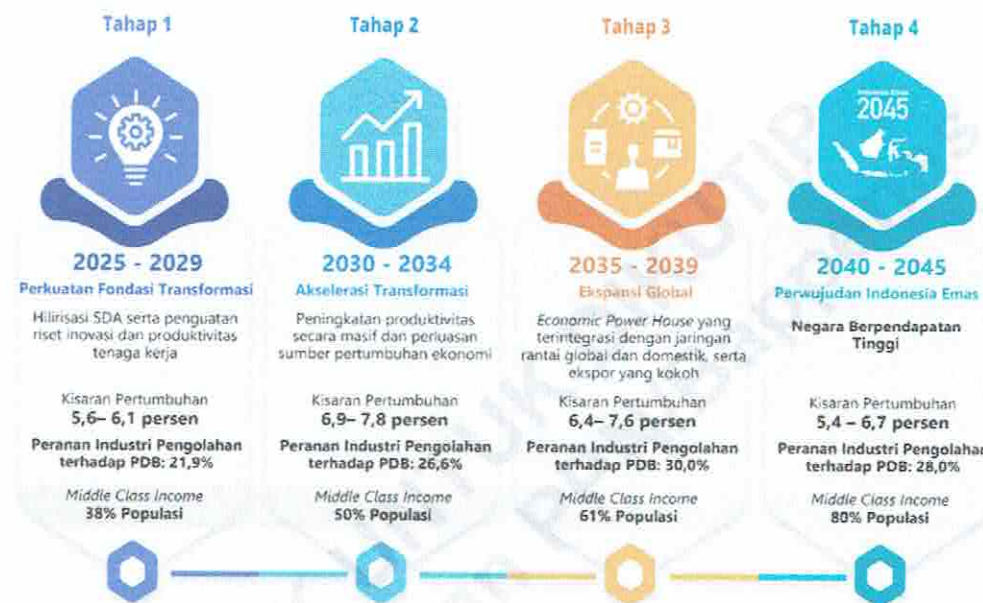


Sesuai dengan tahapan tersebut, pembangunan dalam RPJPN 2025-2045 bertujuan untuk mewujudkan tranformasi indonesia menuju indonesia emas 2045. Termuat dalam delapan agenda pembangunan RPJPN 2025-2045 yaitu sebagai berikut:

1. Transpormasi Sosial



2. Transpormasi Ekonomi



3. Transpormasi Tata Kelola.



4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia.



5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi.



6. Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan.

7. Mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan.

8. Mewujudkan kesinambungan pembangunan.

Pembangunan dalam RPJMN 2025-2029 diarahkan untuk penguatan pondasi transformasi.

Dalam upaya menyeleraskan dengan visi Indonesia Emas 2045, Kementerian Perindustrian mengambil peran penting dalam Implementasi Industri 4.0 Akselerasi visi Indonesia 2045. agar industri manufaktur semakin produktif dan berdaya saing sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, pengembangan industri manufaktur sebagai salah satu tahapan pembangunan nasional.

“Industri sebagai tulang punggung perekonomian karena membawa *multiplier effect* yang cukup besar. Di antaranya adalah peningkatan pada nilai tambah bahan baku dalam negeri, penyerapan tenaga kerja kerja lokal dan penerimaan devisa dari ekspor”. Seiring berjalannya era ekonomi digital saat ini, industri perlu memanfaatkan teknologi manufaktur terkini dalam upaya peningkatan produksinya. Selanjutnya aktif pula melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan guna menciptakan inovasi. Lima sektor yang diprioritaskan dalam implementasi Industri 4.0, yaitu industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian jadi, otomotif, elektronik serta kimia.

Sedangkan Kementerian Perdagangan mengambil peran penting dalam peningkatan perdagangan berjangka komoditi serta mendorong penguatan perdagangan dalam dan luar negeri. Fokusnya adalah peningkatan peran dalam rantai pasok komoditas serta ekosistem perdagangan di pasar lokal dan global, melalui penguatan perdagangan berjangka komoditi (PBK) dapat mendukung peningkatan ekspor komoditas dan menjaga inflasi, di samping sebagai fasilitas pembentukan harga acuan komoditas strategis Indonesia.

Dalam rangka sinkronisasi program antara program nasional dengan program daerah, perlu dilakukan telaahan terhadap kebijakan nasional tersebut, oleh karena itu dalam penyusunan renja tahun 2025 ini dengan memperhatikan pula prioritas dan program nasional, khususnya terkait pembangunan ekonomi berkelanjutan. Adapun program yang akan kami rencanakan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan.
2. Peningkatan ekspor dan calon pelaku usaha ekspor.
3. Peningkatan perdagangan dari komoditi hasil pertanian.
4. Perkembangan megatrend global seperti persaingan sumber daya alam, teknologi, demografi, perdagangan internasional dan perubahan situasi geopolitik.
5. Perkembangan inflasi, resesi global, krisis pangan dan energi, serta perkembangan teknologi seperti AI dan metaverse.
6. Peningkatan kemampuan teknologi industri untuk mendorong peningkatan kegiatan pemerintahan daerah yang bersifat padat karya dalam rangka peningkatan pendapatan serta pengentasan kemiskinan.

7. Penguatan pengawasan izin usaha industri.
8. Penguatan pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).

Secara khusus program arah kebijakan program prioritas dan kegiatan SKPD pada tahun 2025 adalah Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan melalui pemenuhan SNI 8152:2021, Peningkatan tujuan ekspor, pembinaan calon pelaku usaha ekspor serta fasilitasi dalam pameran dagang nasional, Fasilitasi kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi, Memfasilitasi pelaku usaha dalam perizinan sektor perdagangan, Melakukan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang serta menggelar operasi pasar dalam penanganan inflasi daerah dan penurunan stunting, Peningkatan pelayanan tera dan tera ulang serta peningkatan pengawasan metrologi legal dengan penguatan SDM penara, Peningkatan kapasitas produksi, teknik pengolahan produk dan diversifikasi produk IKM, Memfasilitasi IKM dalam legalitas usaha sektor industri, Memfasilitasi sertifikasi produk dan peningkatan nilai pemasaran produk.

Peran sektor perdagangan dalam perekonomian nasional sangat signifikan, baik secara kuantitas maupun kualitas. Secara kuantitas pentingnya peran sektor perdagangan terlihat dari peningkatan kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) sektor perdagangan (besar dan eceran) dalam pendapatan nasional. Secara kualitas, semakin pentingnya sektor perdagangan terlihat dari kegiatan-kegiatan yang lebih mengedepankan kualitas jasa perdagangan untuk mendukung sektor industri, pertanian, kehutanan, perikanan, turisme, pertambangan, dll. Dukungan kegiatan tersebut memberikan pengaruh yang positif terhadap meningkatnya sektor perdagangan. Kegiatan ini antara lain meliputi perbaikan pelayanan publik, iklim usaha, infrastruktur terkait ekspor-impor, pembangunan sekaligus revitalisasi dan harmonisasi pasar rakyat, pasar modern, penyediaan kebutuhan pokok dan stabilisasi harga serta sinergi pengembangan umkm dan petani di bidang perdagangan.

Dalam rangka pencapaian iklim usaha yang kondusif dan terkait dengan efektifitas dan efisiensi dunia usaha kedepan diharapkan mampu meningkatkan performa perdagangan dan investasi didalam negeri. Esensi daya saing yang berkelanjutan terletak pada bagaimana menggerakkan dan mengelola seluruh potensi sumberdaya yang dimiliki.

Sesuai dengan tupoksi serta peran serta Kementerian Perdagangan, dalam rangka membangun daya saing tersebut, perlu adanya suatu sistem manajemen yang efektif dan efisien yang berbasis kinerja harus sejalan dan sinergi dengan perkembangan dinamika pembangunan perdagangan. Selain itu Kementerian Perdagangan sebagai pembina sektor juga terus melakukan peningkatan kualitas pelayanan publik dan perbaikan kinerja manajemen dalam kerangka reformasi birokrasi serta meningkatkan pelayanan peizinan diantaranya melalui peningkatan jumlah izin yang tertangani secara online dan mempercepat waktu penyelesaian perizinan.

Dalam rangka sinkronisasi Program antara Program Nasional dengan Program Daerah, perlu dilakukan telaahan terhadap kebijakan nasional tersebut, oleh karena itu dalam penyusunan Renja Tahun 2025 kami memperhatikan pula prioritas dan program nasional. Secara khusus program arah kebijakan program prioritas dan kegiatan SKPD kami tahun 2025 adalah Peningkatan kapasitas produksi, teknik pengolahan produk dan diversifikasi produk IKM, Memfasilitasi IKM dalam legalitas usaha sektor industri, Memfasilitasi sertifikasi produk dan peningkatan nilai pemasaran produk.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Secara umum tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan tidaklah terlepas dari tujuan yang ingin dicapai Kabupaten Balangan selama lima tahun kedepan yang mana tujuan tersebut telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan 2021-2026, yaitu Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi. Secara khusus tujuan yang ingin dicapai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kontribusi Perdagangan pada Ekonomi Daerah
2. Meningkatnya Kontribusi PDRB Sektor Industri

Adapun sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2025 adalah Sebagai Berikut:

1. Meningkatnya Produktivitas Perdagangan
2. Meningkatnya Perlindungan Konsumen
3. Meningkatnya Pendapatan IKM

3.3 Program dan Kegiatan

Salah satu faktor yang jadi pertimbangan dalam pembuatan rumusan program dan kegiatan ditahun 2025 adalah program-program yang menunjang capaian RPJMD yaitu Program perizinan dan pendaftaran perusahaan, Program peningkatan sarana distribusi perdagangan, Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, Program pengembangan ekspor, Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri, Program standarisasi dan perlindungan konsumen, Program perencanaan dan pembangunan industri, Program pengendalian izin usaha industri dan Program pengelolaan sistem informasi industri nasional. Jika sampai dengan akhir tahun 2025 realisasi dari target masing-masing program tersebut masih belum tercapai/kurang, maka rumusan program dan kegiatan ditahun 2025 akan lebih difokuskan dalam rangka pencapaian target program tersebut ditahun mendatang. Penyusunan program dan kegiatan juga megacu kepada program dan kegiatan prioritas yang telah termuat dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan tahun 2021-2026.

Tabel 3.1
Program dan Kegiatan

Kode Rekening	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Lokasi	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH		80.40 %	11,746,186,746			82.20 %	10,766,030,879
		PERSENTASE TEMUAN BPK YANG DITINDAKLANJUTI		100 %				100 %	
		NILAI SKM PERANGKAT DAERAH		90.00 %				95.50 %	
2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)		100 %	58,451,500			100 %	62,370,330
2.17.01.2.01.0001	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	Kab. Balangan	2	16,881,500	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		2	Dokumen
2.17.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD (Laporan)	Kab. Balangan	5	24,880,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		5	Laporan
3.31.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kab. Balangan	2	16,690,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		2	Dokumen
2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Baik (%)		100 %	8,038,987,696			100 %	8,124,443,408
2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	Kab. Balangan	546	7,423,672,117	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		420	Orang/Bulan

Kode Rekening	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.17.01.2.07	Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan (%)	Kab. Balangan	100	627,962,700		100	%	550,000,000
2.17.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	Kab. Balangan	1	413,291,000	Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil	8	Unit	300,000,000
2.17.01.2.07.0006	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan (Unit)	Kab. Balangan	14	214,671,700	Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil	14	Unit	250,000,000
2.17.01.2.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang Baik (%)		100	395,554,650		100	%	390,200,000
2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan (Laporan)	Kab. Balangan	1	157,199,150	Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil	1	Laporan	190,200,000
2.17.01.2.08.0004	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (Laporan)	Kab. Balangan	1	238,355,500	Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil	1	Laporan	200,000,000
2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang Baik (%)		100	1,023,716,200		100	%	351,950,000
2.17.01.2.09.0001	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (Unit)	Kab. Balangan	55	306,489,200	Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil	55	Unit	310,500,000
2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelnhara (Unit)	Kab. Balangan	97	34,110,000	Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil	100	Unit	41,450,000
2.17.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelnhara/ direhabilitasi (Unit)	Kab. Balangan	1	683,117,000	Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil	1	Unit	-

Kode Rekening	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Lokasi	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.17.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD (Dokumen)	Kab. Balangan	12 Dokumen	615,315,579	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		12 Dokumen	456,590,039
2.17.01.2.05	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Baik (%)		100 %	509,520,000			100 %	190,000,000
2.17.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	Kab. Balangan	2 Orang	509,520,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		19 Orang	190,000,000
2.17.01.2.06	Administrasi Umum perangkat daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Baik (%)		100 %	1,091,974,000			100 %	1,097,067,141
2.17.01.2.06.0001	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (Paket)	Kab. Balangan	1 Paket	24,996,100	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1 Paket	27,495,710
2.17.01.2.06.0002	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Paket)	Kab. Balangan	5 Paket	265,648,100	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		6 Paket	175,221,431
2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Kab. Balangan	1 Paket	64,952,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1 Paket	72,500,000
2.17.01.2.06.0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (Paket)	Kab. Balangan	2 Paket	58,999,700	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		2 Paket	68,600,000
2.17.01.2.06.0006	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (Dokumen)	Kab. Balangan	3 Dokumen	8,301,600	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		3 Dokumen	10,250,000
2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (Laporan)	Kab. Balangan	1 Laporan	668,076,500	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1 Laporan	743,000,000

Kode Rekening	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	PERSENTASE PELAKU USAHA PERDAGANGAN YANG MEMPEROLEH IZIN SESUAI DENGAN KETENTUAN (%)		18.42	237,162,500		20.00	396,267,500
		PERSENTASE JUMLAH KEGIATAN PENGENDALIAN FASILITAS PENYIMPANAN BAHAN BERBAHAYA DAN PENGAWASAN DISTRIBUSI, PENGEMASAN DAN PELABELAN BAHAN BERBAHAYA		100			100	
3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan yang dikeluarkan (Buah)		70	50,000,000		90	91,476,000
3.30.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	Kab. Balangan	1	50,000,000		1	91,476,000
3.30.02.2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Penerbitan Tanda Daftar Gudang (Buah)		5	50,000,000		7	80,000,000
3.30.02.2.02.0001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang (Dokumen)	Kab. Balangan	5	50,000,000		7	80,000,000
3.30.02.2.03	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	Jumlah Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Dalam Negeri (Buah)		11	45,265,000		13	49,791,500
3.30.02.2.03.0001	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	Kab. Balangan	11	45,265,000		13	49,791,500

Kode Rekening	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3.30.02.2.06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengawasan Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) (Laporan)	Kab. Balangan	3	60,000,000		3	75,000,000
3.30.02.2.06.0003	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) (Laporan)	Kab. Balangan	3	60,000,000		3	75,000,000
3.30.02.2.07	Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	Jumlah Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) (Buah)		1	31,897,500		1	100,000,000
3.30.02.2.07.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal (Dokumen)	Kab. Balangan	1	31,897,500		1	100,000,000
3.30.03	PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	PERSENTASE PASAR DI KABUPATEN BALANGAN YANG MEMENUHI STANDAR KELAYAKAN PASAR (%)		10.00	2,109,490,100		10.00	2,317,082,497
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pasar yang direvitalisasi (%)		91.67	1,992,790,100		100.00	2,155,206,860
3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	Kab. Balangan	4	592,849,900		3	791,571,660
3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	Kab. Balangan	11	1,399,940,200		12	1,363,635,200
3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase Pedagang yang Berjualan pada Tempatnya (%)		80.00	116,700,000		100.00	161,875,637
3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana	Kab. Balangan	1	76,100,000		1	79,375,637

Kode Rekening	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Distribusi Perdagangan (Dokumen)						
3.30.03.2.02.0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen)	Kab. Balangan	1	40,600,000		1	82,500,000
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	PERSENTASE STABILITAS DAN JUMLAH KETERSEDIAAN HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK (%)		7.00	571,534,400		6.30	492,910,920
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Kali)		73	571,534,400		81	492,910,920
		Jumlah Pelaksanaan Pasar Murah (Kali)		32			36	
3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan (Laporan)	Kab. Balangan	12	139,234,400		12	147,560,185
3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	Kab. Balangan	1	432,300,000		1	345,350,735
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	PERSENTASE PENINGKATAN PELAKU USAHA EKSPOR (%)		70	329,559,600		100	200,000,000
3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Tujuan Ekspor (%)		66.67	329,559,600		100.00	200,000,000
		Jumlah Calon Pelaku Usaha Ekspor yang Memenuhi Syarat (Orang)		10			15	
3.30.05.2.01.0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan (Pelaku Usaha)	Kab. Balangan	5	329,559,600		6	200,000,000

Kode Rekening	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Lokasi	Rencana Tahun 2025			Catatan Pending	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3.30.06	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	PERSENTASE JUMLAH KEGIATAN METROLOGI LEGAL DILAKSANAKAN (%)		76.92	444,262,400			84.61	721,104,300
		PERSENTASE JUMLAH KEGIATAN PENGAWASAN METROLOGI LEGAL DILAKSANAKAN (%)		29.16				33.33	
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	Jumlah SDM Kemetrologian yang memperoleh sertifikasi teknis (Orang)		2	444,262,400			2	721,104,300
		Jumlah Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda Tera Sah (Buah)		1,400				1,500	
		Jumlah Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) dan BDKT yang diawasi dan sesuai ketentuan (Buah)		160				170	
3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah alat ukur, alat takar, alat timbang, dan alat perlengkapan ditera ulang (Unit)	Kab. Balangan	1,400	297,312,400	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1,500	454,815,200
3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah pelaku usaha di bidang metrologi legal yang dibina (Orang)	Kab. Balangan	50	146,950,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		50	266,289,100
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	PERSENTASE PENINGKATAN NILAI PRODUK LOKAL (%)		21.74	1,708,013,700			25.00	1,000,000,000
3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Nilai Transaksi Promosi Perdagangan (Rupiah)		1,680,000,000	1,708,013,700			2,100,000,000	1,000,000,000
		Persentase Produk Lokal Perdagangan yang Berkualitas (%)		37.50				45.45	
30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota (UMKM)	Kab. Balangan	28	1,708,013,700	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		35	1,000,000,000
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	PERSENTASE IKM YANG MENERAPKAN TEKNOLOGI INDUSTRI (%)		14.00	836,724,000			15.00	1,320,000,000

Kode Rekening	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Lokasi	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3.31.02.2.01	Penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri Kabupaten/Kota	Jumlah IKM yang Memiliki SDM yang Bersertifikasi Sesuai Kebutuhan (IKM)		5 IKM	836,724,000			5 IKM	1,320,000,000
		Jumlah IKM yang Memiliki Teknologi (IKM)		350 IKM				375 IKM	
3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dokumen)	Kab. Balangan	1 Dokumen	295,995,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1 Dokumen	275,000,000
3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)	Kab. Balangan	1 Dokumen	540,729,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1 Dokumen	1,045,000,000
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	PERSENTASE PERTUMBUHAN IKM (%)		2.11 %	244,722,500			2.18 %	325,000,000
3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah IKM yang Memiliki Izin (IKM)		120 IKM	244,722,500			160 IKM	325,000,000
3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Kab. Balangan	1 Dokumen	159,461,500	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1 Dokumen	100,000,000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

1.1 Faktor-Faktor yang Menjadi Bahan Pertimbangan Dalam Penetapan Program dan Kegiatan

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Program dilaksanakan dan dijabarkan dalam beberapa kegiatan. Program Perangkat Daerah merupakan program-program RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Perumusan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun 2025 mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2023.
2. Pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2023.
3. Prioritas pengembangan sektor perindustrian dan sektor perdagangan yang diwujudkan dalam kegiatan.

1.2 Analisa Sosial Ekonomi

Setelah dirumuskan pertimbangan untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah, penetapan 9 program prioritas dan 1 program penunjang yang dijabarkan kedalam 21 kegiatan dan 40 Sub kegiatan pada rencana kerja tahun 2025 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan, tentunya perlu dilakukan analisa sosial ekonomi.

Analisa dilakukan pada 2 (Dua) urusan pemerintahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan yaitu:

1. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
 - a. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
Melalui sosialisasi tata cara pengajuan permohonan surat rekomendasi dan atau fasilitasi permohonan perizinan elektronik

terintegrasi berbasis resiko (OSS-RBA) untuk membantu masyarakat/pelaku usaha dalam mendapatkan surat keterangan izin usaha dan atau surat rekomendasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melalui kegiatan pendataan waralaba informasi pelaku usaha kemitraan waralaba yang ada di Kabupaten Balangan dikumpulkan sebagai bahan awal bagi Dinas/Bidang/Instansi terkait untuk meningkatkan kegiatan usaha waralaba, melaksanakan pembinaan serta monitoring keberlangsungan kemitraan usaha antara pemberi waralaba dengan pengusaha kecil dan menengah di Kabupaten Balangan.

b. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Bertujuan untuk menunjang peningkatan sarana distribusi perdagangan (pasar) melalui beberapa kegiatan yaitu, pembangunan sarana distribusi perdagangan, revitalisasi atau perbaikan sarana distribusi perdagangan, pemeliharaan sarana distribusi perdagangan, pemberdayaan dan pembinaan pengelola sarana distribusi perdagangan serta penataan pedagang. Adapun dampak dan manfaat dari program, diantaranya:

Dengan melakukan pembangunan pasar atau revitalisasi pasar, akan dapat memperbanyak lapak/tempat pedagang yang dapat berjualan pada pasar tersebut. Melalui pengelolaan sarana distribusi perdagangan yaitu pemeliharaan, pembersihan dan pengawasan sarana distribusi perdagangan, fasilitas sarana perdagangan yang telah ada dapat terpelihara dan tidak kumuh, nyaman saat berbelanja/bertransaksi serta kemudahan akses hingga tertatanya pedagang membuat pasar akan terlihat rapi. Pasar adalah salah satu titik penting dalam perekonomian sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli dan tempat perputaran uang.

c. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Kegiatan yang dilakukan untuk menstabilisasi harga kebutuhan pokok dan barang penting jika sewaktu-waktu terjadi kenaikan harga/inflasi di daerah dengan langkah nyata berupa pelaksanaan

kegiatan pasar murah dalam upaya membantu menjaga nilai daya beli masyarakat

d. Program Pengembangan Ekspor

Memfasilitasi pelaku usaha dalam mengembangkan pemasaran produknya ke pasar yang lebih luas melalui pameran dagang yang dapat diikuti dan pelatihan ekspor. Program ini bertujuan menghimpun produk lokal dan unggulan daerah untuk dapat mempromosikan produknya. Diharapkan dapat membantu produk lokal dan unggulan daerah dalam mempromosikan dan memasarkan dengan difasilitasi untuk mengikuti pameran dagang dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan atau omset peserta pameran dagang serta menumbuhkan ekonomi kreatif.

e. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

Memfasilitasi produk lokal dan unggulan daerah agar dapat masuk retail-retail modern guna meningkatkan pendapatan pelaku usaha dan mengembangkan pemasaran produk lokal dan unggulan daerah yang dituangkan kedalam hubungan kerjasama (Mou) dengan retail modern.

f. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

Guna memberikan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha dengan terjaminnya kebenaran pengukuran/panakaran/penimbangan serta memastikan kebenaran pengukuran/panakaran/penimbangan dengan perlindungan hukum dan keadilan transaksi agar dapat meningkatkan saling kepercayaan dalam transaksi jual beli di masyarakat.

2. Urusan Pemerintah Bidang Perindustrian

a. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Perencanaan dan Pembangunan Industri melalui pelatihan IKM. Melalui pelatihan IKM diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dengan meningkatkan ketrampilan dalam proses produksi maupun peningkatan manajerial, IKM diajarkan untuk meningkatkan produktifitas produksi sehingga bisa mendapatkan hasil yang optimal. Pelatihan tidak hanya diajarkan tentang operasional dan teknis namun IKM juga diberikan pengertian

tentang teknologi terbaru yang dapat digunakan untuk efisiensi kerja.

b. Program Pengendalian Izin Usaha Industri

- Pengendalian Izin Usaha Industri melalui sertifikasi halal gratis. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan melaksanakan kegiatan fasilitasi sistem jaminan halal (SJH) kepada IKM untuk didaftarkan untuk mendapatkan sertifikasi halal produk olahannya. Karena dengan sudah memiliki sertifikasi halal produk memberikan banyak manfaat kepada peningkatan penjualan produk. Berikut beberapa manfaat dari sertifikasi halal bagi produsen. Pertama, meningkatkan kepercayaan dari konsumen, karena dengan adanya label halal produk, maka konsumen tidak merasa khawatir dengan kandungan pada produk. Kedua, dapat meningkatkan luas jangkauan pemasaran, kepercayaan konsumen yang baik dapat meningkatkan jangkauan pasar dari produk olahan. Produk akan semakin dikenal dan menjadi pilihan oleh masyarakat luas. Dengan hal ini, produk memiliki peluang untuk memperluas jaringan pemasaran hingga ke daerah lain
- Pengendalian Izin Usaha Industri melalui pendaftaran merek gratis. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan melaksanakan kegiatan pendaftaran merek gratis kepada IKM. Pendaftaran merek merupakan hal penting yang harus dilakukan dalam bisnis khususnya pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) dan bisnis rintisan berbasis digital atau Startup. Hal ini karena pendaftaran tersebut memberi perlindungan hukum bagi pelaku usaha agar merek dagangnya tidak digunakan pihak lain. Selain itu, pendaftaran merek juga memberi kepercayaan lebih oleh konsumen terhadap produk yang dijual. Merek berfungsi untuk menjamin asal barang atau jasa. Sehingga, fungsi tersebut berkontribusi pada transparansi pasar yang menguntungkan konsumen dan pelaku usaha. Suatu usaha harus dilindungi terhadap pesaing tidak sehat yang

menginginkan barang atau jasanya menyamar sebagai barang atau jasa usaha orang lain.

c. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Dijaman era digitalisasi seperti sekarang banyak kebijakan pemerintah yang mengarah pada sistem pelayanan, perijinan dan pendataan secara online. Banyak para pelaku usaha Industri Kecil Menengah yang belum bisa melakukan secara mandiri, untuk menyikapi hal tersebut Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan memberikan fasilitasi kepada para Industri Kecil Menengah (IKM) untuk memperoleh perijinan seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui aplikasi Online Single Submission (OSS), memfasilitasi pendaftaran melalui aplikasi Sistem Informasi Pendaftaran Pelatihan Industri (SIMANIS) serta memfasilitasi pendaftaran dan pelaporan melalui aplikasi Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan juga melakukan pendataan bagi para Industri Kecil Menengah (IKM) yang ada diseluruh Kabupaten Balangan guna mempermudah untuk melakukan pembinaan dan mengukur tingkat produktivitas para IKM. Selain itu juga melakukan sosialisasi, pembinaan dan pengawasan terhadap para pelaku usaha agar mendapatkan pemahaman lebih terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

Bersama Dewan Kerajinan Nasional (DEKRANASDA) Kabupaten Balangan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan berusaha mewujudkan Industri Kerajinan Balangan yang mandiri dan berdaya saing berbasis sumber daya unggulan untuk mewujudkan ketahanan ekonomi daerah dengan cara mempromosikan hasil-hasil kerajinan IKM Balangan melalui partisipasi pameran-pameran baik skala kabupaten, provinsi maupun nasional. Selain itu juga melakukan pembinaan dan pelatihan guna meningkatkan kreativitas para pengrajin sehingga mereka mampu berinovasi dan terus meningkatkan kualitas hasil kerajinan mereka.

1.3 Uraian Garis Besar Mengenai Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan tahun 2025 disusun mengacu kepada Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan tahun 2021-2026 yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026.

Tahun 2025 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan merencanakan sebanyak total 10 program, 21 kegiatan dan 40 Sub Kegiatan dengan Program prioritas dengan jumlah total anggaran sebesar Rp. 19.397.620.546,-

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Kode Rekening	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Lokasi	Rencana Tahun 2025			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH		80.40	11,746,166,746		82.20	10,766,030,879	
		PERSENTASE TEMUAN BPK YANG		100			100		
		DITINDAKLANJUTI							
		NILAI SKM PERANGKAT DAERAH		90.00			95.50		
2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)		100	58,451,500		100	62,370,330	
2.17.01.2.01.0001	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	Kab. Balangan	2		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	2	Dokumen	18,888,100
2.17.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD (Laporan)	Kab. Balangan	5	24,880,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	5	Laporan	25,123,230
3.31.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Validasi Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Validasi Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kab. Balangan	2	16,690,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	2	Dokumen	18,359,000
2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Baik (%)		100	8,038,987,696		100	8,124,443,408	
2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	Kab. Balangan	546	7,423,672,117	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	420	Orang/Bulan	7,667,853,369

Kode Rekening	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.17.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD (Dokumen)	Kab. Balangan	12 Dokumen	615,315,579	12 Dokumen	456,590,039
2.17.01.2.05	Administrasi kepegawalan perangkat daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah yang Baik (%)		100 %	509,520,000	100 %	190,000,000
2.17.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	Kab. Balangan	2 Orang	509,520,000	19 Orang	190,000,000
2.17.01.2.06	Administrasi Umum perangkat daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Baik (%)		100 %	1,091,974,000	100 %	1,097,067,141
2.17.01.2.06.0001	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (Paket)	Kab. Balangan	1 Paket	24,996,100	1 Paket	27,495,710
2.17.01.2.06.0002	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Paket)	Kab. Balangan	5 Paket	285,648,100	6 Paket	175,221,431
2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Kab. Balangan	1 Paket	64,952,000	1 Paket	72,500,000
2.17.01.2.06.0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (Paket)	Kab. Balangan	2 Paket	59,999,700	2 Paket	68,600,000
2.17.01.2.06.0006	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (Dokumen)	Kab. Balangan	3 Dokumen	8,301,600	3 Dokumen	10,250,000
2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (Laporan)	Kab. Balangan	1 Laporan	668,076,500	1 Laporan	743,000,000

Kode Rekening	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Rencana Tahun 2025		Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.17.01.2.07	Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan (%)	Kab. Balangan	100	627,962,700	%			100	550,000,000
2.17.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	Kab. Balangan	1	413,291,000	Unit			8	300,000,000
2.17.01.2.07.0006	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan (Unit)	Kab. Balangan	14	214,671,700	Unit			14	250,000,000
2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang Baik (%)		100	395,554,650	%			100	390,200,000
2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan (Laporan)	Kab. Balangan	1	157,199,150	Laporan			1	150,200,000
2.17.01.2.08.0004	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (Laporan)	Kab. Balangan	1	238,355,500	Laporan			1	200,000,000
2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang Baik (%)		100	1,023,716,200	%			100	351,950,000
2.17.01.2.09.0001	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (Unit)	Kab. Balangan	55	306,489,200	Unit			55	310,500,000
2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	Kab. Balangan	97	34,110,000	Unit			100	41,450,000
2.17.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)	Kab. Balangan	1	683,117,000	Unit			1	-

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan

Kode Rekening	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	PERSENTASE PELAKU USAHA PERDAGANGAN YANG MEMPEROLEH IZIN SESUAI DENGAN KETENTUAN (%)		18.42	237,162,500		20.00	396,267,500
		PERSENTASE JUMLAH KEGIATAN PENGENDALIAN FASILITAS PENYIMPANAN BAHAN BERBAHAYA DAN PENGAWASAN DAN DISTRIBUSI, PENGEMASAN DAN PELABELAN BAHAN BERBAHAYA		100			100	
3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan yang dikeluarkan (Buah)		70	50,000,000		90	91,476,000
3.30.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	Kab. Balangan	1	50,000,000		1	91,476,000
3.30.02.2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Penerbitan Tanda Daftar Gudang (Buah)		5	50,000,000		7	80,000,000
3.30.02.2.02.0001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang (Dokumen)	Kab. Balangan	5	50,000,000		7	80,000,000
3.30.02.2.03	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	Jumlah Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Dalam Negeri (Buah)		11	45,285,000		13	49,791,500
3.30.02.2.03.0001	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik	Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	Kab. Balangan	11	45,285,000		13	49,791,500

Kode Rekening	Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Lokasi	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	PERSENTASE JUMLAH KEGIATAN METROLOGI LEGAL DILAKSANAKAN (%)		76.92	444,262,400			84.61	721,104,300
		PERSENTASE JUMLAH KEGIATAN PENGAWASAN METROLOGI LEGAL DILAKSANAKAN (%)		29.16				33.33	
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	Jumlah SDM Kemetrologian yang memperoleh sertifikasi teknis (Orang)		2	444,262,400			2	721,104,300
		Jumlah Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda Tera Sah (Buah)		1,400				1,500	
		Jumlah Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) dan BDKT yang diawasi dan sesuai ketentuan (Buah)		160				170	
3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah alat ukur, alat takar, alat timbang, dan alat perlengkapan ditera ulang (Unit)	Kab. Balangan	1,400				1,500	454,815,200
3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah pelaku usaha dibidang metrologi legal yang dibina (Orang)	Kab. Balangan	50				50	286,289,100
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	PERSENTASE PENINGKATAN NILAI PRODUK LOKAL (%)		21.74	1,708,013,700			25.00	1,000,000,000
3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Nilai Transaksi Promosi Perdagangan (Rupiah)		1,680,000,000				2,100,000,000	1,000,000,000
		Persentase Produk Lokal Perdagangan yang Berkualitas (%)		37.50				45.45	
30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota (UMKM)	Kab. Balangan	28				35	1,000,000,000
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	PERSENTASE IKM YANG MENERAPKAN TEKNOLOGI INDUSTRI (%)		14.00	836,724,000			15.00	1,320,000,000

Kode Rekening	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3.31.02.2.01	Penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah IKM yang Memiliki SDM yang Bersertifikasi Sesuai Kebutuhan (IKM)		5	836,724,000		5	1,320,000,000
3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah IKM yang Memiliki Teknologi (IKM)		350			375	
3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pemberdayaan Sumber Daya Industri (Dokumen)	Kab. Balangan	1	295,995,000		1	275,000,000
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)	Kab. Balangan	1	540,729,000		1	1,045,000,000
3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	PERSENTASE PERTUMBUHAN IKM (%) Jumlah IKM yang Memiliki Izin (IKM)		2.11	244,722,500		2.18	325,000,000
3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Penzinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Kab. Balangan	120	244,722,500		160	325,000,000
3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Penzinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Kab. Balangan	1	159,461,500		1	100,000,000

Kode Rekening	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3.31.03.2.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)	Kab. Balangan	1 Dokumen	85,261,000		1 Dokumen	225,000,000
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	PERSENTASE SKALA USAHA IKM YANG BERKEMBANG (%)		2.58 %	1,169,984,600		3.58 %	1,375,000,000
3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Nilai Pemasaran Produk IKM (Rupiah)		284.05 Rupiah	1,169,984,600		294.48 Rupiah	1,375,000,000
3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi pengumpulan, pengolahan dan analisis data industri, data kawasan industri serta data lain lingkup Kabupaten/kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Produk IKM Bersertifikasi (IKM)	Kab. Balangan	156 IKM			166 IKM	
3.31.04.2.01.0002	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas Kabupaten/Kota (Dokumen)	Kab. Balangan	1 Dokumen	169,985,000		1 Dokumen	175,000,000
				1 Dokumen	999,999,600		1 Dokumen	1,200,000,000
				JUMLAH PAGU INDIKATIF	19,387,620,546	JUMLAH PAGU INDIKATIF		18,913,396,096



BAB V PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun 2025 ini merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan pemerintah Kabupaten Balangan secara keseluruhan. Rincian daftar program dan kegiatan yang termuat dalam Rencana Kerja tahun 2025 diupayakan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta tepat waktu. Selain **input** yang baik, hal yang juga penting untuk diperhatikan adalah kualitas pelaksanaan kegiatan. **Input** dan **proses** akan memberikan **benefit** dan **impact** kepada **output** maupun **outcome**, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu semua pihak terkait, khususnya jajaran aparat yang ada didalam Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan perlu mencermati berbagai rambu dan petunjuk didalam melaksanakan tugas serta mengemban tanggungjawabnya. Pelaksanaan tugas harus fokus pada upaya mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang secara tidak langsung juga akan berdampak pada pencapaian Visi dan Misi kepala daerah yang berupaya untuk mewujudkan Kabupaten Balangan dalam Membangun Desa, Menata Kota Menuju Balangan yang Lebih Maju dan Sejahtera.

Kesadaran untuk secara terus-menerus memperbaiki diri dan meningkatkan kinerja telah ditunjang dengan pencanangan penerapan *Good Governance* dilingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan. Momentum ini sangat relevan untuk dimanfaatkan dalam rangka *revitalisasi* diri maupun organisasi.

Paringin, Juli 2024
Plt. Kepala Dinas,





**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

Jl. Ahmad Yani Km 4,5 Kel. Batu Piring Kec. Paringin Selatan Kode Pos 71662
Telp. (0526) 2029523 Email. disperindagblg@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BALANGAN**

NOMOR : 800/018 /SK/DISPERINDAG-BLG/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN
BALANGAN
TAHUN 2025**

KEPALA PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan Tahun 2025, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1312);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
11. Peraturan Bupati Balangan Nomor 55 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BALANGAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2025

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan Tahun 2025;

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
a. menginventarisir dan menyiapkan data sebagai bahan

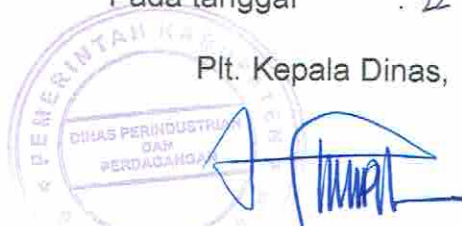
- penyusunan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan;
- b. mengkaji dan meneliti bahan dan data yang disajikan untuk penyusunan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan;
 - c. melaksanakan koordinasi intern Tim Penyusun guna penyusunan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan;
 - d. merumuskan kebijakan guna kelancaran penyusunan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan;
 - e. melaksanakan penyusunan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan;
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan tugas penyusunan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan;
 - g. melaporkan hasilnya pada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan selaku Pengguna Anggaran.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan selaku Pengguna Anggaran.

KEEMPAT : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Paringin
Pada tanggal : 22 Maret 2024

Plt. Kepala Dinas,



HERLINA, S.Sos, MM

Pembina – (VI/a)

NIP. 19701205 199603 2 003

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERIDAGANGAN KABUPATEN
BALANGAN
NOMOR : 800/ ~~DI~~SK/DISPERINDAG-BLG/2024
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2025

**SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2025**

NO	NAMA / NIP	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	HERLINA, S. Sos, MM NIP. 19701205 199603 2 003	Plt. Kepala Dinas	Penanggung jawab
2	SAHRIL, S.Kom NIP. 19851127201001 1 014	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Ketua
3	SYAHRIDHA ELYANI, S.Pi, M.P NIP. 19810123 200501 2 015	Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan	Sekretaris
4	RIZA KURNIAWAN, S.STP, M.IP NIP. 19870328 200602 1 001	Kepala Bidang Kemetrolagian dan Stabilisasi Harga	Anggota
5	Hj. IDA ROSIYANTI, SE NIP. 19780620 200604 2 021	Kepala Bidang Perindustrian	Anggota
6	SAMSUL BAKHRI, S.Pd.I, MM NIP. 19831125 200801 1 006	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
7	EKA MAYA JURADA, SE NIP. 19751230 200604 2 020	Jf Analis Perdagangan Ahli Muda	Anggota
8	MAYDHILA SAPUTRI, S.Si NIP. 19840516 2009 2 009	Jf Pengawas Kemetrolagian Ahli Muda	Anggota
9	ASBIT, SE NIP. 19810817 201503 1 001	Jf Analis Perdagangan Ahli Muda	Anggota
10	ARIEFANSYAH, A.Md NIP. 19811031 200604 1 015	Jf Analis Perdagangan Ahli Muda	Anggota
11	SUNTARI SRI REJEKI, ST,MT NIP. 19821019 200604 2 007	Jf Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda	Anggota
12	ALFIAN NOOR, S.Sos NIP. 19781219 201001 1 012	Jf Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda	Anggota
13	MAKMUR RAJABI, S.Sos NIP. 19800909 200701 1 016	Kepala UPTD Pasar	Anggota

Ditetapkan di : Paringin
Pada tanggal : 22 Maret 2024

Plt. Kepala Dinas,


HERLINA, S.Sos, MM
Pembina – (VI/a)
NIP. 19701205 199603 2 003